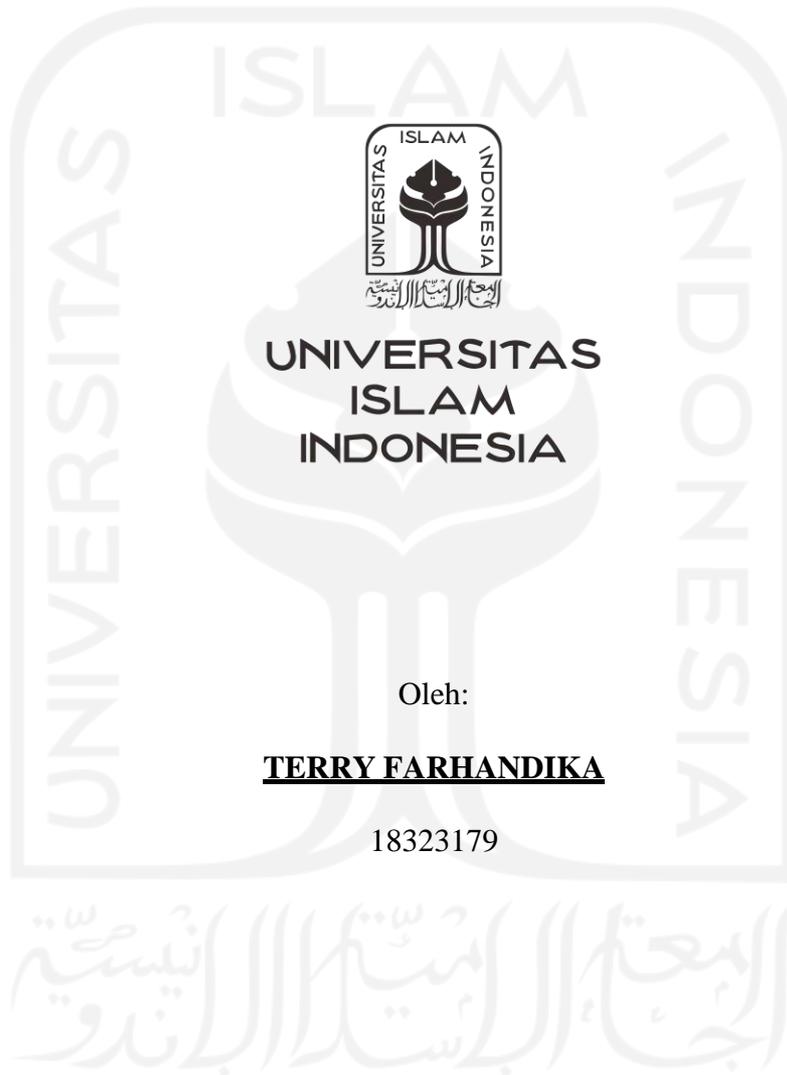


**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENINGKATAN KERJA SAMA INDONESIA-AMERIKA SERIKAT
DALAM PEMBERANTASAN TERORISME TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI



Oleh:

TERRY FARHANDIKA

18323179

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENINGKATAN KERJA SAMA INDONESIA-AMERIKA SERIKAT
DALAM PEMBERANTASAN TERORISME TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

TERRY FARHANDIKA

18323179

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN KERJA SAMA INDONESIA-AMERIKA SERIKAT DALAM PEMBERANTASAN TERORISME TAHUN 2015-2019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

- Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

17 November 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

Hangga Fathana
Rizki Dian Nursita
Masitoh Nur Rohma

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Kamis, 17 November 2022



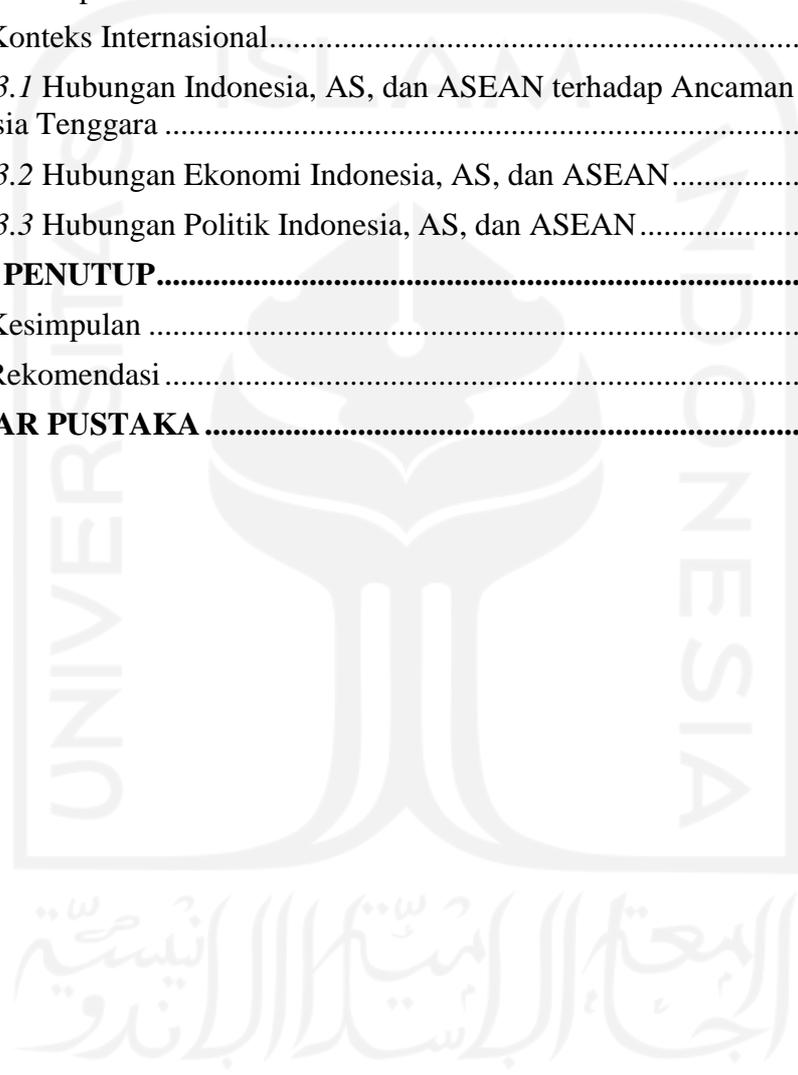
Terry Farhandika



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DAN GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan Penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	16
1.8.1 Jenis Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	17
1.8.4 Proses Penelitian.....	17
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB 2 KEBIJAKAN DAN KERJA SAMA INDONESIA-AS DALAM PEMBERANTASAN TERORISME	19
2.1 Kebijakan Indonesia & AS dalam Penanganan Terorisme	19
2.1.1 Indonesia	19
2.1.2 Amerika Serikat	23
2.2 Kerja Sama Indonesia-AS dalam Penanganan Terorisme.....	28
2.2.1 Tahun 2001-2004	28
2.2.2 Tahun 2004-2014	30
2.2.3 Tahun 2015-2019	33
BAB 3 PENGARUH FAKTOR POLITIK DOMESTIK, KAPABILITAS EKONOMI DAN MILITER, SERTA KONTEKS INTERNASIONAL TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA	37
3.1 Politik Domestik.....	37

3.1.1	Luhur Binsar Pandjaitan sebagai <i>Bureaucratic Influencer</i>	38
3.1.2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai <i>Partisan Influencer</i>	44
3.1.3	Nahdlatul Ulama (NU) sebagai <i>Interest Influencer</i>	48
3.1.4	Opini Publik sebagai <i>Mass Influencer</i>	53
3.2	Kapabilitas Ekonomi dan Militer	58
3.2.1	Kapabilitas Ekonomi Indonesia	60
3.2.2	Kapabilitas Militer Indonesia	62
3.3	Konteks Internasional.....	65
3.3.1	Hubungan Indonesia, AS, dan ASEAN terhadap Ancaman Geografis Asia Tenggara	67
3.3.2	Hubungan Ekonomi Indonesia, AS, dan ASEAN.....	69
3.3.3	Hubungan Politik Indonesia, AS, dan ASEAN.....	71
BAB 4	PENUTUP.....	75
4.1	Kesimpulan	75
4.2	Rekomendasi	76
DAFTAR PUSTAKA	78



DAFTAR TABEL, GRAFIK, DAN GAMBAR

Grafik

Grafik 1.1 Data Insiden Terorisme di Indonesia 2001-2019.....	2
---	---

Gambar

Gambar 1.2 Skema Pengaruh Tiga Faktor terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia	14
--	----

Tabel

Tabel 2.1 Pertumbuhan Institusi Studi Kajian Terorisme	25
Tabel 3.1 Pengaruh Politik Domestik melalui Policy Influencer terhadap Kerja Sama Kontra-terorisme Indonesia-AS	57
Tabel 3.2 Klasifikasi Negara World Bank berdasarkan GNP per kapita	60
Tabel 3.3 Data Perbandingan Indikator Ekonomi Indonesia-AS	61
Tabel 3.4 Pengaruh Kapabilitas Ekonomi dan Militer terhadap Kerja Sama Kontra-terorisme Indonesia-AS	64
Tabel 3.5 Pengaruh Konteks Internasional terhadap Kerja Sama Kontra-terorisme Indonesia-AS	73



DAFTAR SINGKATAN

ADMM	: ASEAN <i>Defense Minister Meeting</i>
ADMM+	: ASEAN <i>Defense Minister Meeting Plus</i>
AEC	: ASEAN <i>Economic Community</i>
AFTA	: ASEAN <i>Free Trade Area</i>
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
APSC	: ASEAN <i>Political-Security Community</i>
AS	: Amerika Serikat
ATA	: <i>Anti-Terrorism Assistance</i>
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
CSIS	: <i>Center for Strategic and Internasional Studies</i>
CTFP	: <i>Combating Terrorism Fellowship Program</i>
CVE	: <i>Countering Violent Extremism</i>
Densus 88	: Detasemen Khusus 88
DHS	: <i>Department of Homeland Security</i>
DKPT	: Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme
DoD	: <i>Department of Defense</i>
DoJ	: <i>Department of Justice</i>
Dephan	: Departemen Pertahanan
Deplu	: Departemen Luar Negeri
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
E3	: <i>Expanded Economic Engagement</i>
FBI	: <i>Federal Bureau of Investigation</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
FKPT	: Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
FMFP	: <i>Foreign Military Financing Program</i>
FMS	: <i>Foreign Military Sales</i>
GFP	: <i>Global Fire Power</i>
GNP	: <i>Gross National Product</i>
GTD	: <i>Global Terrorism Database</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia
I2	: <i>Indonesia Indicator</i>
IMET	: <i>International Military Education and Training</i>
ISIL	: <i>Islamic State of Iraq and the Levant</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
IUSSD	: <i>Indonesia-US Security Dialogue</i>
JI	: <i>Jemaah Islamiyah</i>
Kemhan	: Kementerian Pertahanan
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
Koopsus	: Komando Operasi Khusus
Kopassus	: Komando Pasukan Khusus
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LoI	: <i>Letter of Intent</i>

LSI	: Lembaga Survei Indonesia
MAP	: <i>Military Assistance Program</i>
Menkopolhukam	: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NADR-ATA	: <i>Non-Proliferation Anti-Terrorism Demining and Related Programs Anti-Terrorism Assistance</i>
NCTC	: <i>National Counter Terrorism Center</i>
NSCT	: <i>National Security for Countering Terrorism</i>
NSS	: <i>National Security Strategy</i>
NU	: Nahdlatul Ulama
OMSP	: Operasi Militer Selain Perang
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PNB	: Pendapatan Nasional Bruto
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
RDCTFP	: <i>Regional Defence Counter Terrorism Fellowship Programs</i>
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
SIPRI	: <i>Stockholm International Peace Research Institute</i>
SOF	: <i>Special Operation Force</i>
START	: <i>National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TIFA	: <i>Trade and Investment Framework Agreement</i>
TIFA	: <i>Trade and Investment Framework Arrangement</i>
USIBDD	: <i>United States-Indonesia Bilateral Defense Dialogue</i>
UU	: Undang-Undang
WNI	: Warga Negara Indonesia
WTC	: <i>World Trade Center</i>

ABSTRAK

Hubungan kerja sama kontra-terorisme antara Indonesia dan Amerika Serikat telah melalui proses yang panjang. Titik terang kerja sama antara pemerintah kedua negara telah dimulai sejak pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan terus berlanjut secara signifikan hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tren serangan terorisme yang telah mengalami pergeseran menjadi skala yang lebih kecil dan fokus utama kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia yang lebih mengacu pada sektor ekonomi, namun pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo tahun 2015-2019 tetap memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS. Fenomena tersebut dapat dilihat melalui Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri yang digagas oleh William D. Coplin dan mampu membantu menjelaskan tiga faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia. Berdasarkan Teori Pengambilan Keputusan dapat dilihat bahwa faktor politik domestik diperankan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nahdlatul Ulama dan Opini Publik; faktor kapabilitas ekonomi dan militer Indonesia menjadi tolak ukur tingkat kekuatan negara untuk merumuskan kebijakan luar negerinya dengan negara adidaya seperti AS; serta faktor konteks internasional dapat ditinjau berdasarkan hubungan dan kepentingan geografis, ekonomis, maupun politis antara Indonesia, AS, dan ASEAN.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Indonesia, Kerja Sama, Kontra-terorisme, Pengambilan Keputusan Luar Negeri.

ABSTRACT

The counter-terrorism cooperation relationship between Indonesia and the United States has gone through a long process. The bright spot for cooperation between the governments of the two countries has started since the government of Megawati Soekarnoputri and has continued significantly until the government of Susilo Bambang Yudhoyono. The trend of terrorist attacks has shifted to a smaller scale and the main focus of the Indonesian government's foreign policy which refers more to the economic sector, but the Indonesian government under the leadership of Joko Widodo in 2015-2019 still decided to increase counter-terrorism cooperation with the US. This phenomenon can be seen through the Theory of Foreign Decision Making initiated by William D. Coplin and is able to help explain the three factors that influence Indonesian government policy. Based on the Decision Making Theory, it can be seen that domestic political factors were played by Luhut Binsar Pandjaitan, the Indonesian Democratic Party of Struggle, Nahdlatul Ulama and Public Opinion; the factor of Indonesia's economic and military capabilities is a benchmark for the level of state power to formulate its foreign policy with a superpower like the US; as well as international context factors can be reviewed based on geographical, economic and political relations and interests between Indonesia, the US and ASEAN.

Keywords: Cooperation, Counter-Terrorism, Foreign Decision Making, Indonesia, United States.

BAB 1

PENDAHULUAN

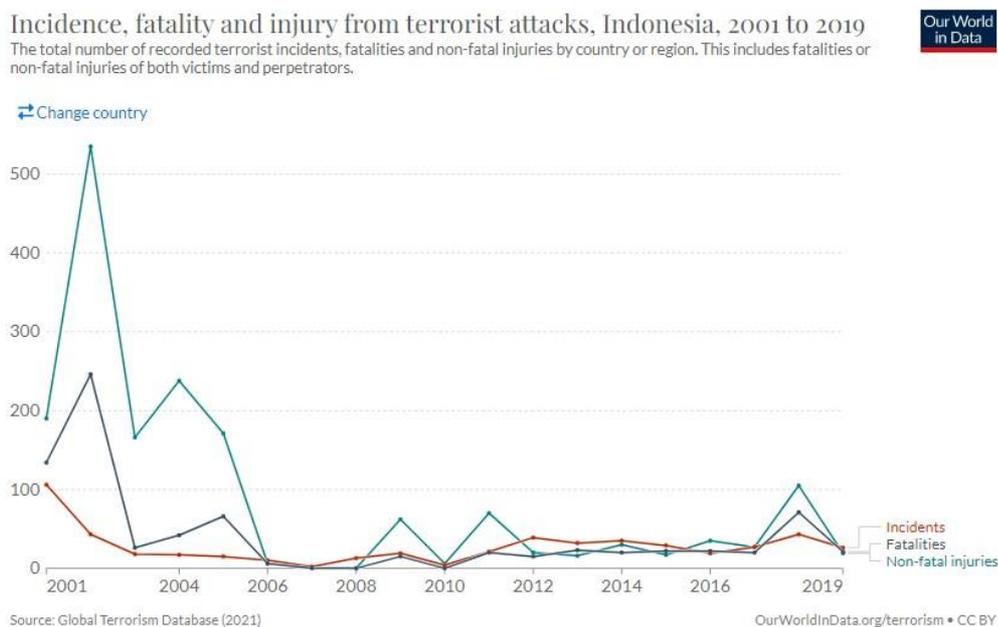
1.1 Latar Belakang

Peristiwa pengeboman *World Trade Center* (WTC) pada 11 September 2001 turut membawa dampak perubahan terhadap agenda politik luar negeri Amerika Serikat (AS) yang membentuk respons hampir seluruh negara di dunia dalam memerangi terorisme (Windiani 2018). Insiden 9/11 tersebut melahirkan respons internasional untuk mengencangkan aksinya dalam melawan terorisme, serta klasifikasi terorisme sebagai suatu aksi kejahatan terhadap kemanusiaan yang dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga sejak saat itu diperlukan strategi khusus dalam menangani isu terorisme (Kusuma, Warsito, Surwandono, and Muhammad 2019). Dalam mengatasi ancaman terorisme yang bersifat lintas batas negara, hal yang wajib apabila ancaman tersebut membutuhkan penanganan secara luas dan serentak dalam ikatan kerja sama yang kuat baik antar negara, agama, serta seluruh komponen masyarakat (Qodir 2012). Ancaman terhadap negara yang semula hanya berputar pada masalah tradisional seperti ancaman militer, berubah menjadi ancaman non-tradisional yakni terorisme yang menjadi perhatian utama dunia dan mempengaruhi suatu negara dalam merumuskan kebijakan keamanan dan perdamaannya baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional (Yunanto, Damayanti, and Novitasari 2017, 341).

Titik terang kerja sama kontra-terorisme Indonesia-AS telah dijalankan sejak masa pemerintahan Megawati. Pertemuan Megawati dan George W. Bush di

AS menjadi momen penting masuknya kerja sama Indonesia-AS dalam memberantas terorisme secara signifikan dan terus dijalankan hingga kini (Marshall, Picou, and Gill 2003). Agenda kuat AS dalam menyuarkan kebijakan *Global War on Terror* seolah-olah menuntut negara lainnya terhadap dua pilihan, bergabung dengan AS dalam mendukung kebijakannya melawan terorisme atau dianggap menjadi bagian dari kelompok terorisme dan secara otomatis menjadi lawan AS (Kusuma, Warsito, Surwandono, and Muhammad 2019). Begitu pula hubungan kerja sama pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia-AS tetap melakukan kerja sama dalam bidang kontra-terorisme. Indonesia dan AS memiliki pandangan yang sama bahwa ancaman terorisme merupakan isu penting bagi keselamatan dan kedaulatan negara (Sukadis 2018). Pandangan yang sama antara Indonesia-AS terkait terorisme selama masa pemerintahan Megawati dan SBY telah menghasilkan berbagai kesepakatan kerja sama kontra-terorisme kedua negara yang berjalan dengan harmonis.

Grafik 1.1 Data Insiden Terorisme di Indonesia 2001-2019



Sumber: Our World in Data (2022).

Berdasarkan *Global Terrorism Database* (GTD) yang dipublikasi oleh *National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism* (START) menunjukkan bahwa insiden serangan terorisme terbanyak terjadi pada tahun 2001. Berbagai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani serangan terorisme tidak serta merta menghilangkan insiden terorisme begitu saja, serangan terorisme terus terjadi hingga masa kepemimpinan Joko Widodo. Berdasarkan grafik diatas, insiden terorisme tahun 2015-2019 sedikit mengalami jumlah kenaikan dibandingkan periode SBY, namun dampak dan skala serangan lebih kecil. Tren terorisme mengalami pergeseran tujuan penyerangan pasca tahun 2010, sebelum tahun 2010 tujuan penyerangan ditargetkan pada hal yang berkaitan dengan AS atau negara barat, namun bergeser menjadi serangan terhadap aparat dan pemerintah nasional. Karakteristik pengeboman tahun 2000 hingga 2010 dilakukan melalui bentuk serangan berdaya ledak tinggi dan dampak skala besar, namun pasca tahun 2010 berubah menjadi serangan sporadik skala kecil dan dampak yang relatif lebih kecil (The Habibie Center 2018).

Pada masa kepemimpinan Joko Widodo, fokus kebijakan luar negeri Indonesia lebih bertumpu pada penguatan kerja sama ekonomi. Prioritas kebijakan luar negeri lebih ditekankan pada kerja sama sektor ekonomi demi mencapai kepentingan nasional Indonesia dibandingkan kerja sama kontra-terorisme (Widiatmaja and Albab 2019). Jokowi memandang bahwa kerja sama yang dijalankan wajib memberikan manfaat nyata secara langsung terhadap Indonesia, sehingga tujuan utama kebijakan luar negeri diimplementasikan dalam upaya perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, promosi peluang

ekonomi bagi perusahaan Indonesia, serta mendatangkan investasi asing (Murphy 2019).

Berdasarkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), penguatan pendirian ekonomi demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mengacu pada peningkatan fasilitas perdagangan dan investasi internasional melalui diplomasi ekonomi Indonesia yang dilakukan dalam sektor perdagangan, pariwisata, investasi, dan kerja sama ekonomi (Fitriani and Panduwinata 2018). Orientasi pemerintahan Jokowi terhadap penguatan kebijakan domestik (*inward-looking*) cenderung mengacu pada sektor ekonomi dan infrastruktur (Widiatmaja and Albab 2019). Fokus kebijakan luar negeri yang bertumpu pada diplomasi ekonomi, maka sejalan dengan fenomena bahwa kerja sama terorisme tidak menjadi isu utama yang menjadi topik kedua negara, namun antara tahun 2015-2019 pemerintah Indonesia memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS melalui berbagai kesepakatan.

Berbagai kegiatan kerja sama Indonesia-AS yang telah dilakukan pemerintahan Megawati hingga saat ini telah melalui proses yang cukup panjang. Pengalaman dan pandangan yang sama terkait isu terorisme menjadi satu poin penting pemerintah dalam melakukan kerja sama dalam memberantas terorisme. Terlepas dari kedua negara yang telah melakukan berbagai kerja sama kontra-terorisme pada pemerintahan Megawati dan SBY, namun pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo antara tahun 2015 hingga 2019 memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS, meskipun kerja sama kontra-terorisme tidak menjadi agenda prioritas kebijakan luar negeri Indonesia.

Terlepas dari skala serangan terorisme yang lebih kecil pada pemerintahan Joko Widodo dan fokus kerja sama kontra-terorisme Indonesia-AS yang tidak menjadi isu utama, namun pemerintah Indonesia tetap meningkatkan kerja sama dalam menangani isu terorisme. Penting untuk diteliti mengapa Indonesia-AS memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme pada periode pemerintahan Joko Widodo antara tahun 2015-2019. Oleh karena itu, timbul pertanyaan pada penelitian ini mengenai -Mengapa pemerintah Indonesia pada tahun 2015-2019 memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS? melalui Teori *Decision Making* atau Teori Pengambilan Keputusan kebijakan luar negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa pemerintah Indonesia pada tahun 2015-2019 memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penyebab pemerintah Indonesia pada tahun 2015-2019 memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS.
2. Untuk mendeskripsikan kerja sama dan kebijakan pemerintah Indonesia-AS dalam memberantas isu terorisme pada tahun 2001-2019.
3. Untuk mengetahui kebijakan dan kerja sama yang disepakati Indonesia-AS pada tahun 2015-2019 dalam mengatasi isu terorisme.

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki fokus dimulai dari keputusan peningkatan kerja sama pemerintah Indonesia dengan AS selama tahun 2015 hingga 2019. Penulis memiliki alasan dalam mengambil penelitian pada tahun tersebut karena pemerintah Indonesia memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS melalui berbagai kesepakatan. Kerja sama kontra-terorisme Indonesia-AS sejak masa pemerintahan Megawati-SBY telah terlihat signifikan, namun pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS selama tahun 2015-2019, meskipun tidak menjadi isu utama kebijakan luar negeri Indonesia. Batasan waktu yang diambil bertujuan untuk melihat kebijakan pemerintahan Joko Widodo terhadap pengambilan keputusan peningkatan kerja sama Indonesia-AS dalam pemberantasan isu terorisme.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini penulis menggunakan jurnal dalam membandingkan dan sumber terhadap penelitian yang berjudul *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Amerika Serikat dalam Pemberantasan Terorisme Tahun 2015-2019*. Beberapa tinjauan pustaka yang digunakan diharapkan mampu untuk melengkapi penelitian ini sebagai bagian dari referensi penulis.

Pertama, Cesarani Rilistya menjelaskan bahwa kerja sama kontra-terorisme AS dilakukan pasca insiden Bom Bali yang menjelaskan proses implementasi kerja sama kontra-terorisme Indonesia-AS melalui perspektif

liberalisme. Rilistya mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi kerja sama. Faktor pendorong yaitu hubungan baik Indonesia-AS dan Indonesia sebagai mitra strategis AS di kawasan Asia, sedangkan faktor penghambat terdiri dari tugas penanganan terorisme yang tidak seimbang antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Densus 88 yang diduga melakukan pelanggaran HAM dalam menangani pelaku teror (Rilistya 2016). AS memiliki peran penting dalam keberhasilan Indonesia menangani ancaman terorisme terutama terhadap Densus 88. Pemerintah kedua negara melakukan kerja sama melalui *Anti-Terrorism Assistance (ATA) Program* dalam Densus 88 dan *Regional Defense Combating Terrorism Fellowship Program (CTPF)* dalam TNI. Analisis yang dilakukan Rilistya memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas kerja sama antara Indonesia-AS dalam kontra-terorisme, namun penelitian yang dilakukan penulis ditujukan untuk mengetahui alasan pemerintah Joko Widodo tetap melaksanakan kerja sama kontra-terorisme dengan AS.

Kedua, Ganewati Wuryandari menjelaskan bahwa tekanan domestik dialami Indonesia dalam memberantas terorisme mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia yang ditinjau melalui perspektif Teoritik Hubungan Internasional. Wuryandari mengidentifikasi bahwa tekanan yang dihadapi lebih terlihat pada Pemerintahan Megawati dibandingkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi faktor penghambat pemerintah terhadap tekanan isu terorisme internasional. Perbedaan antara kebijakan SBY dan Megawati dalam menangani isu terorisme cenderung berbeda. Pada era kepemimpinan Megawati, kebijakan dilakukan melalui *strategic hedging* yakni Indonesia mendukung AS

dalam memberantas terorisme, namun tetap mempertimbangkan kepentingan nasionalnya, berbeda dengan SBY yang menunjukkan komitmen penuh terhadap kebijakan AS. Berbagai kerja sama Indonesia-AS dalam memberantas isu terorisme membuahkan hasil baik bagi kedua negara, dibuktikan dengan kebijakan keduanya untuk memberikan bantuan-bantuan bersifat teknis, seperti kerja sama pertukaran informasi dan intelijen, pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan kapasitas kelembagaan (Wuryandari 2014). Analisis yang dilakukan Wuryandari memiliki keterkaitan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap isu terorisme internasional, namun penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia pada ranah bilateral, regional, dan multilateral berdasarkan perspektif Teoritik Hubungan Internasional. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia antara tahun 2015-2019 yang memutuskan meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS.

Ketiga, Seniwati dan Andi Alimuddin memiliki fokus bahasan yang menjelaskan bentuk kontribusi AS dalam membantu Indonesia menangani terorisme. Pemerintah AS menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dalam prioritas agenda *Global War on Terror* di Asia Tenggara. Komitmen Indonesia-AS terbentuk pada bantuan sektor militer baik melalui pendanaan hingga kerja sama berbagai instansi terkait (Seniwati and Alimuddin 2016). Seniwati dan Andi Alimuddin mengidentifikasi berbagai bantuan tindakan penanganan terorisme yang dilakukan AS terhadap Indonesia. Analisis yang dilakukan Seniwati dan Andi Alimuddin memiliki korelasi dengan penelitian

penulis apabila dilihat melalui aspek kerja sama Indonesia-AS dalam memberantas terorisme di Indonesia melalui berbagai rangkaian program. Namun, Seniwati dan Andi Alimuddin tidak membahas seberapa penting kerja sama yang telah dilakukan kedua negara untuk menjadi acuan mengapa pemerintahan Indonesia perlu memutuskan untuk meningkatkan kerja sama dengan AS dalam bidang kontra-terorisme.

Keempat, Aji Widiatmaja dan Ulul Albab memiliki fokus pembahasan pada perbedaan orientasi kebijakan luar negeri pada era Joko Widodo dan SBY berdasarkan kondisi Asia Tenggara. Peran aktif SBY dalam membentuk citra positif Indonesia di ranah internasional tidak begitu terlihat pada kepemimpinan Joko Widodo. Aji Widiatmaja dan Ulul Albab mengidentifikasi kebijakan luar negeri kedua pemerintahan demi mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing pemerintah, serta menghasilkan rekomendasi gabungan kebijakan Pemerintah Indonesia yang berorientasi pada *outward-looking* dan *inward-looking* dalam arah kebijakan luar negeri (Widiatmaja and Albab 2019). Analisis yang dilakukan Aji Widiatmaja dan Ulul Albab memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada kebijakan luar negeri yang dilakukan Joko Widodo dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Aji Widiatmaja dan Ulul Albab telah menjelaskan kebijakan luar negeri Joko Widodo, namun penulis melihat terdapat celah bahwa tidak terdapat pembahasan terhadap hubungan kerja sama bilateral kontra-terorisme Indonesia-AS berdasarkan arah kebijakan luar negerinya, meskipun ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara relatif tinggi. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis dapat dilihat melalui keputusan pemerintah Indonesia yang tetap meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-AS

dalam menangani terorisme berdasarkan pembahasan dan analisis yang lebih spesifik.

Dari pemaparan tinjauan pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis terdapat perbedaan mendasar bahwa penulis lebih melakukan eksplorasi terkait landasan pemerintah Indonesia pada pemerintahan Joko Widodo antara tahun 2015-2019 yang memutuskan untuk meningkatkan kerja sama dengan AS dalam memberantas isu terorisme berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia. Penelitian sebelumnya tidak membahas pengaruh terhadap pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS berdasarkan Teori Pengambilan Keputusan menurut William D. Coplin, sehingga penulis memilih tema penelitian untuk menjelaskan lebih dalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh William D. Coplin untuk membantu menjawab, mengkaji, dan menjelaskan masalah yang menjadi fokus penelitian. Teori yang digunakan mengacu pada Teori Pengambilan Keputusan luar negeri atau *Decision Making* yang dikemukakan oleh William D. Coplin. Menurut Coplin, Teori Pengambilan Keputusan mengacu pada kebijakan luar negeri yang diambil oleh pengambil keputusan dipengaruhi dan didasarkan pada beberapa faktor. Pada proses pengambilan keputusan luar negeri, Coplin berpendapat bahwa terdapat tiga faktor yang memberikan pengaruh penting

kepada para pengambil keputusan suatu negara untuk merumuskan kebijakan luar negerinya, yaitu berdasarkan kondisi politik domestik, kapabilitas ekonomi-militer, dan konteks internasional (Coplin 1992, 30). Lebih lanjut, Coplin menambahkan bahwa konteks internasional terbentuk atas kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh negara lain dan memiliki pengaruh kuat terhadap politik domestik dan ekonomi-militer suatu negara. Oleh karena itu, ketiga faktor diatas sangat berdampak terhadap aktor pengambil keputusan dalam mengambil arah kebijakan luar negerinya.

Faktor pertama adalah politik domestik yang merupakan hubungan antara pengambil kebijakan luar negeri dan aktor domestik yang mempengaruhi arah kebijakan luar negeri. Aktor yang mempengaruhi kebijakan disebut sebagai pemberi pengaruh kebijakan, sedangkan hubungan aktor politik domestik dengan pengambil kebijakan luar negeri disebut sebagai sistem pengaruh kebijakan. Menurut Coplin, pemberi pengaruh kebijakan terbagi menjadi empat tipe yakni *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer* dan *mass influencer* (Coplin 1992, 81). *Bureaucratic influencer* merupakan berbagai individu atau organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintahan yang memiliki tugas untuk membantu pengambil keputusan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakannya. Birokrat sangat berpengaruh sebab mereka mempunyai akses langsung kepada pengambil keputusan, sehingga pengambil keputusan bergantung pada birokrat untuk mendapatkan informasi penting bagi proses pembuatan kebijakan dan bantuan terhadap kebijakan yang akan dibentuk. *Partisan influencer* merupakan partai politik suatu negara yang bertujuan untuk menerjemahkan berbagai tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis, yakni

tuntutan kepada pada pengambil keputusan yang mengacu pada kebijakan pemerintah. Partai politik berupaya memberikan pengaruhnya dengan cara menekan pengambil keputusan, serta menyediakan aktor-aktor yang dapat berperan dalam pengambilan kebijakan. *Interest influencer* merupakan kelompok kepentingan yang terdiri atas sekelompok orang yang bergabung melalui serangkaian kepentingan yang sama, memiliki peran yang besar karena banyak organisasi dan kelompok informal terkadang memiliki sumber finansial yang besar, serta mampu mempengaruhi para pemilih dan *partisan influencer*. Dalam memainkan pengaruhnya terhadap pengambil keputusan, mereka menggunakan beberapa cara untuk membentuk dukungan terhadap kepentingan mereka, seperti kampanye menulis surat hingga janji dukungan finansial atau ancaman menarik dukungan kepada pengambil keputusan. *Mass influencer* merupakan opini publik yang diperlukan oleh pengambil keputusan karena peran mereka dalam pemilu. Dalam perumusan kebijakan yang akan diambil, pengambil keputusan memperhitungkan dampaknya terhadap opini publik dan pemilu berikutnya. Opini publik belum memiliki kemampuan untuk memberikan arah yang jelas bagi pengambil keputusan karena keputusan luar negeri biasanya bersifat khusus dan kompleks, sehingga seolah-olah opini publik hanya sekedar suatu kekuatan yang mengarahkan pengambil keputusan. Para pengambil keputusan menggunakan opini publik untuk merasionalisasi tindakan-tindakan politik luar negerinya, meskipun opini publik tidak mengarahkan kebijakan luar negeri namun hal tersebut memainkan peran penting karena menciptakan alam perseptual bagi para pengambil keputusan (Coplin 1992, 82-91). Pada sistem pengaruh kebijakan terjadi keterkaitan antara pengambil keputusan dan pemberi pengaruh kebijakan,

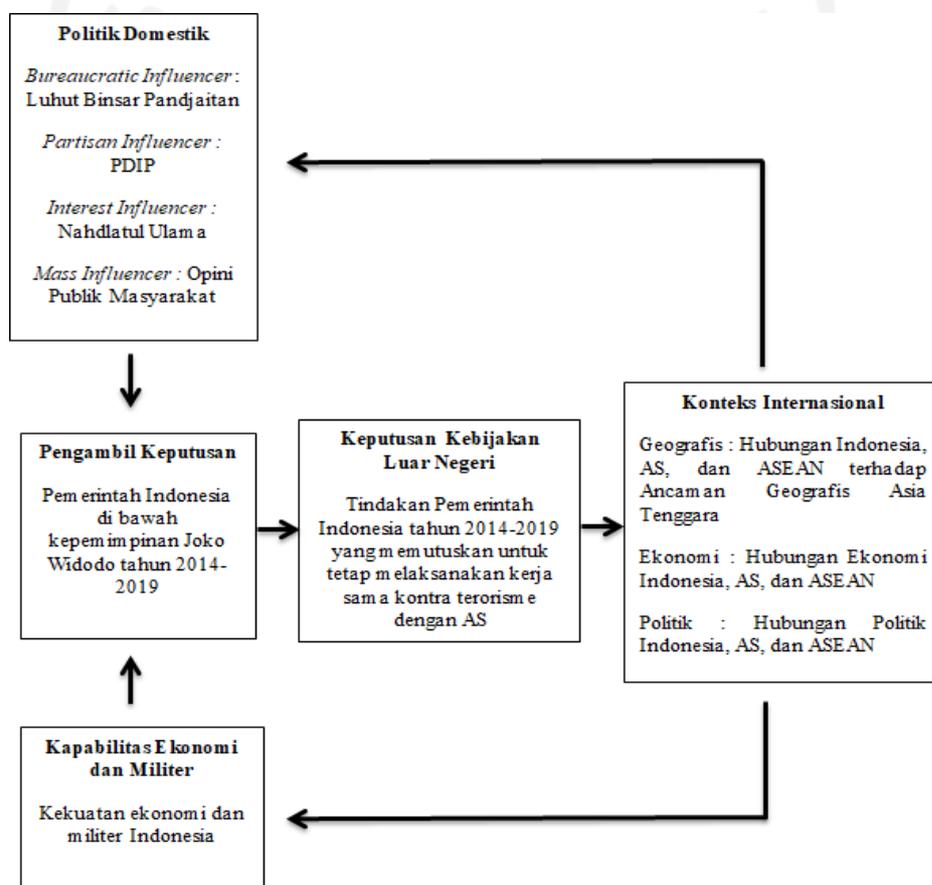
sebab pemberi pengaruh kebijakan merupakan sumber dukungan untuk memperkuat posisi pemerintah. Pemerintah membutuhkan berbagai dukungan rakyat untuk memastikan posisinya serta memperkuat legitimasinya untuk merumuskan kebijakan secara tepat. Coplin memandang bahwa politik domestik merupakan perilaku atau kepentingan nasional yang akan diimplementasikan pada kebijakan luar negeri.

Faktor kedua adalah kapabilitas ekonomi dan militer suatu negara yang berperan penting terhadap posisi negara dalam mengambil kebijakan luar negerinya. Tingkat kemampuan ekonomi dan militer yang kuat dapat membangun negara untuk lebih aktif dalam politik internasional (Coplin 1992, 110). Menurut Coplin, kemampuan ekonomi dan militer suatu negara akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri yang dibentuk oleh suatu negara. Kemampuan ekonomi dan militer negara penting dan berpengaruh terhadap kemampuan negara untuk menekan negara lain dan dibutuhkan demi menjamin tercapainya kepentingan nasional suatu negara.

Faktor ketiga adalah konteks internasional yang berbicara tentang posisi hubungan suatu negara dengan negara lainnya dalam sistem internasional. Menurut Coplin, terdapat tiga elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara yaitu melalui geografis, ekonomi, dan politik. Lingkungan internasional suatu negara terdiri atas lokasi yang didudukinya dan berkaitan dengan negara lain, serta terjadinya hubungan ekonomi dan politik antara suatu negara dengan negara lain, sehingga kondisi geografis memiliki peran dalam sistem politik internasional (Coplin 1992, 167).

Relevansi Teori Pengambilan Keputusan dengan tema penelitian ini terdapat pada tiga faktor, yakni politik domestik domestik, kapabilitas ekonomi dan militer, serta konteks internasional. Ketiga faktor pada teori Coplin yang menjadi alat analisis membantu menjawab alasan pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS.

Gambar 1.2 Skema Pengaruh Tiga Faktor terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia



Sumber: Coplin (1992, 30).

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan pengaruh terhadap kebijakan luar negeri dalam Teori Pengambilan Keputusan oleh Coplin, kebijakan pemerintah Indonesia pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk meningkatkan

kerja sama kontra-terorisme dengan AS tahun 2015-2019 dipengaruhi atas tiga faktor. Pertama, kondisi politik domestik dipengaruhi oleh *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer*. Pengaruh birokratik diperankan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Pengaruh partai diperankan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pengaruh kelompok kepentingan diperankan oleh Nahdlatul Ulama, dan Pengaruh Opini publik diperankan oleh berbagai elemen masyarakat. Kedua, kapabilitas ekonomi dan militer Indonesia yang menjadi tolak ukur perumusan kebijakan luar negeri yang ditentukan. Pengaruh kapabilitas ekonomi dilihat melalui tingkat kekuatan ekonomi Indonesia bahwa kekuatan ekonominya berbeda jauh dengan AS, sehingga penting apabila Indonesia meningkatkan kerja sama dengan AS. Di sisi lain, pengaruh kapabilitas militer dilihat melalui tingkat kekuatan militer Indonesia yang termasuk dalam urutan militer terbaik dunia, sehingga menjadi acuan kerja sama dengan AS sebagai kekuatan militer terbaik di dunia demi tercapainya kepentingan bersama. Ketiga, konteks internasional yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Joko Widodo berdasarkan kondisi geografis, ekonomi, dan politik. Ketiga kondisi dilihat melalui kepentingan Indonesia, AS dan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang serupa dalam mengatasi ancaman terorisme di Asia Tenggara. Hubungan baik dalam sektor politik dan ekonomi antar mereka, serta pengaruh besar AS terhadap kondisi geografis, politik, dan ekonomi dapat mempengaruhi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS sebagai mitra strategis dalam mencapai kepentingannya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis faktor yang mempengaruhi pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS pada tahun 2015-2019, diawali dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan analisis data sehingga penulis menemukan kesimpulan dari pembahasan. Dalam ilmu hubungan internasional, kerja sama merupakan fenomena dari adanya pemikiran dalam upaya mencapai kepentingan nasional, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis menggunakan metode kualitatif sebagai konsep berdasarkan pendekatan deskriptif, dalam kata lain pendekatan ini dilakukan melalui kerangka tulisan ilmiah yang didukung oleh beberapa sumber yang valid.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini meliputi pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo tahun 2015-2019 sebagai aktor dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang memutuskan untuk meningkatkan kerja sama dengan AS, adapun objek dari penelitian ini adalah kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS tahun 2015-2019 sebagai upaya penanganan terorisme melalui Teori Pengambilan Keputusan luar negeri.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan dari studi kepustakaan (*Library Research*). Sumber data ini meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, media elektronik yang berkaitan dengan topik penelitian, serta melalui penelusuran daring situs-situs yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia-AS yang relevan dengan topik pembahasan. seperti jurnal dengan topik kebijakan luar negeri Indonesia dan kerja sama kontra-terorisme, hingga website resmi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis melakukan pra-riset sebagai persiapan penelitian dengan melihat data yang terkait dengan penelitian hingga membaca sumber bacaan sesuai topik penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan mengumpulkan dari sumber sekunder yang meliputi buku, jurnal, berita, media elektronik, dan situs-situs yang relevan, serta analisis data yang merupakan proses untuk memperoleh suatu pemahaman terhadap topik penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membagi penelitian melalui empat bab untuk menjelaskan rencana penelitian pada setiap bab yang diteliti, dapat dilihat sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian mengenai pengalaman terorisme yang dialami kedua negara, serta

munculnya peningkatan kebijakan dan kerja sama kedua negara untuk memerangi terorisme lebih lanjut.

BAB 2: Kebijakan dan Kerja Sama Indonesia-AS dalam Pemberantasan Terorisme, pada bab ini penulis membahas tentang kebijakan yang dibentuk oleh kedua negara dalam mengatasi isu terorisme dan kerja sama kontra-terorisme yang dijalankan oleh Indonesia-AS mulai dari tahun 2001 hingga 2019.

BAB 3: Pengaruh Faktor Politik Domestik, Kapabilitas Ekonomi dan Militer, serta Konteks Internasional terhadap Pemerintah Indonesia, pada bab ini penulis mengidentifikasi pengaruh faktor kondisi politik domestik melalui empat tipe aktor, faktor kapabilitas ekonomi dan militer Indonesia, serta konteks internasional terhadap pengambilan keputusan pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS antara tahun 2015-2019. Analisis ketiga faktor tersebut didasarkan pada Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri yang digagas oleh William D. Coplin.

BAB 4: Penutup, berisikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi.

BAB 2

KEBIJAKAN DAN KERJA SAMA INDONESIA-AS DALAM PEMBERANTASAN TERORISME

2.1 Kebijakan Indonesia & AS dalam Penanganan Terorisme

2.1.1 Indonesia

Transformasi pemerintahan Orde Baru ke Reformasi yang menjadi jalur demokratis di Indonesia justru tidak mengurangi aksi terorisme (Windiani 2018). Tercatat bahwa sejak era Reformasi Indonesia telah mengalami insiden terorisme lebih dari 100 kali termasuk serangan berskala besar maupun kecil yang dilakukan baik melalui bom dengan sarana mobil, bom bunuh diri, atau bahkan bom kecil seperti buku sekalipun (Yunanto, Damayanti, and Novitasari 2017, 267). Dimulai dari tragedi Bom Bali 1 hingga rentetan aksi pengeboman yang dilakukan oleh kelompok teroris mulai dari pengeboman Hotel J.W Marriot tahun 2003 hingga J.W.Marriot Ritz Carlton tahun 2009 semakin menguatkan kesadaran pemerintah bahwa terorisme merupakan suatu ancaman yang nyata bagi keamanan nasional Indonesia (Wuryandari 2014). Terlepas dari banyaknya peristiwa terorisme yang telah terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2000an, berbagai insiden tersebut tetap mendapat sorotan dunia yang cukup tinggi hingga kini, sehingga penting apabila gerakan terorisme perlu diperhatikan dan dimusnahkan secara tuntas di seluruh dunia.

Pasca insiden tersebut beberapa negara Eropa menetapkan *travel warning* atas Indonesia yang dilatarbelakangi oleh banyaknya korban wisatawan mancanegara yang ikut terseret dalam kejadian tersebut. Kebijakan *travel warning*

atau travel ban yang dikeluarkan oleh beberapa negara salah satunya AS, kemudian berdampak pada penurunan pendapatan sektor pariwisata Indonesia (Hasanah 2018). Kebijakan larangan bepergian tersebut berimbas pada penurunan jumlah wisatawan asing sebanyak 22% pada tahun 2003 (Widajatun and Ichسانی 2019). Selain hantaman terhadap sektor pariwisata, peristiwa yang menggemparkan khalayak internasional tersebut juga menjadi momentum penting bagi keseriusan pemerintah Indonesia untuk menaruh perhatian penting dalam menangani permasalahan terorisme (Ibad and Aji 2020).

Dalam merespons insiden tersebut, pemerintah Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003. Penetapan Undang-undang yang bersifat reaktif tersebut dalam merespons insiden yang telah terjadi dianggap masih kurang efektif, sebab tidak ada pasal yang bersifat antisipatif serta memberikan kewenangan kepada aparat untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum serangan teroris terjadi (The Habibie Center 2018). Pemerintah turut membentuk lembaga anti terorisme Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) pada 22 Oktober 2002 berdasarkan Inpres No 4 tahun 2002 dan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan No Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 yang ditujukan untuk mengkoordinasikan pemberantasan terorisme (Wuryandari 2014).

Melalui institusi Polri, Detasemen Khusus (Densus 88) turut dibentuk sebagai pasukan khusus penanganan terorisme yang bertugas di lapangan secara langsung, memiliki kewenangan tinggi yang diperbolehkan melakukan

penangkapan para terduga teroris (meskipun hanya berbekal bukti awal laporan intelijen) (Kusuma, Warsito, Surwandono, and Muhammad 2019). Pelibatan TNI dalam mendukung pemberantasan terorisme juga telah tertulis dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan bertugas untuk membantu institusi Polri dalam mengatasi ancaman tersebut (Triskaputri 2019). Pada kebijakan luar negeri, pemerintah Indonesia pada saat itu berorientasi pada *strategic hedging* yang mendukung AS dalam agenda melawan terorismenya, namun Indonesia tetap mengkalkulasikan kepentingan nasionalnya untuk menentang aksi sepihak negara adidaya dalam mengatasi ancaman terorisme terorisme global (Wuryandari 2014).

Insiden yang kerap terjadi pada masa pemerintahan SBY, turut melahirkan respons pemerintah. Pemerintahan SBY melakukan pengembangan lembaga DKPT menjadi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 sebagai tindak lanjut atas UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dalam mengatasi ancaman terorisme bersama (Windiani 2018). BNPT bertugas untuk menyusun strategi, koordinasi antar instansi pemerintah terkait, hingga melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dan kerja sama internasional melalui tiga pendekatan yakni ideologi, politik dan hukum (Yunanto, Damayanti, and Novitasari 2017, 300). SBY juga berfokus dalam melakukan pemberantasan terhadap aliran dana terorisme melalui UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pendanaan Terorisme (Matondang 2016). Pada kebijakan luar negerinya, SBY cenderung berupaya untuk memulihkan citra baik Indonesia di mata dunia yang terlihat selalu berkomitmen

dan konsisten dalam mendukung kebijakan AS (Wuryandari 2014). Peran aktif SBY turut dibuktikan melalui partisipasi di berbagai forum global, menjadi ketua *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *Counter Terrorism Task Force*, serta berupaya membangun komunikasi dengan berbagai negara non-Islam dengan tujuan membentuk kepercayaan bahwa Islam memiliki paham yang sama dalam melawan terorisme (Widiatmaja and Albab 2019).

Pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), pemerintah tetap berupaya untuk menghalau gerakan terorisme. Dalam merespons serangkaian aksi terorisme sejak 2016 hingga 2018, pada 25 Mei 2018 Jokowi berencana untuk melakukan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003, serta memberikan ultimatum untuk membentuk Perpu apabila revisi UU tersebut tidak lulus Amandemen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Hara and Azizah 2022). UU tersebut kemudian ditetapkan melalui UU Nomor 5 Tahun 2018 pada tanggal 21 Juni 2018, tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian BUMN 2021). Atas kewenangan Polri yang tercantum pada UU tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terduga terorisme kemudian Polri berhasil melakukan penangkapan terhadap 370 terduga teroris, pemberlakuan UU tersebut semakin memperkuat kebijakan penanganan terorisme sebab pemerintah mampu bergerak lebih cepat dalam melakukan pencegahan dibandingkan UU sebelumnya (Mukhtar 2021). UU tersebut turut mencantumkan pelibatan TNI dalam memberantas terorisme dibawah perintah Presiden, kemudian TNI turut serta membentuk Komando Operasi Khusus (Koopsus) (Hara and Azizah 2022). Pada

ranah luar negeri, peran Indonesia dalam isu terorisme melalui forum internasional cenderung diperankan oleh Kemlu dan Kementerian Pertahanan (Kemhan), sehingga Jokowi tidak terlihat secara langsung dan begitu aktif memainkan perannya (Widiatmaja and Albab 2019).

2.1.2 Amerika Serikat

Banyaknya insiden terorisme yang telah terjadi di AS dan dilakukan dari berbagai kelompok (teroris sayap kanan, sayap kiri, religius, dan lainnya), perlu diperhatikan bahwa terorisme yang berlandaskan kelompok religius telah memberikan dampak paling fatal terhadap kemanusiaan dengan korban jiwa sebanyak 3.086 jiwa dalam kurun waktu antara tahun 1994 hingga 2019 dan jumlah tersebut didominasi oleh korban tragedi 9/11 sebanyak hampir 3000 jiwa berdasarkan analisa data *Center for Strategic and International Studies (CSIS) Transnational Threats Project* (G. Jones, Doxsee, and Harington 2020).

Peristiwa 9/11 turut membawa dampak perubahan terhadap orientasi politik luar negeri AS yang diikuti respons hampir seluruh negara di dunia untuk memerangi terorisme (Windiani 2018). Insiden tersebut juga melahirkan respons internasional untuk menggencarkan aksinya dalam melawan terorisme, serta mengklasifikasikan terorisme sebagai suatu aksi kejahatan terhadap kemanusiaan dan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Sejak saat itu diperlukan strategi khusus dalam menangani kejahatan tersebut, salah satunya AS yang melahirkan konsep atau definisi baru terkait terorisme melalui *USA Patriot Act 2001* (Kusuma, Warsito, Surwandono, and Muhammad 2019).

Respons tegas AS terhadap ancaman terorisme dinyatakan oleh Presiden George W Bush pasca insiden. Bush menyatakan bahwa kelompok radikal dan

teroris merupakan musuh AS dan setiap negara yang turut mendukung kelompok tersebut dianggap sebagai musuh AS (Kusuma, Warsito, Surwandono, and Muhammad 2019). Tanggapan Bush diperkuat dengan arah kebijakan luar negerinya bahwa isu terorisme internasional menjadi salah satu agenda prioritas bagi AS dan turut menggeser agenda tantangan geopolitik global menjadi perang melawan terorisme (Mumtazinur 2016). Perang global skala besar dalam memberantas terorisme juga dilakukan melalui berbagai operasi militer yang cukup menguras sumber daya dan anggaran AS (The Habibie Center 2018). Penanganan AS dilakukan dengan sangat progresif dalam mengeluarkan kebijakan koalisi dunia untuk memerangi terorisme melalui berbagai strategi, baik kekuatan nasional negara maupun di ranah internasional seperti melalui diplomasi, tekanan hukum, intelejen, pemeriksaan keuangan, aksi militer hingga bantuan pangan (Windiani 2018).

Pada kebijakan domestik, agenda AS dalam melawan terorisme dibuktikan melalui pembentukan lembaga *Anti-Terrorism Task Forces* dan *Foreign Terrorist Tracking Force* (Kedang 2017). AS turut membentuk *The United States National Security Strategy (NSS)* pada tahun 2002 sebagai upaya strategi nasional dalam mengantisipasi atau mencegah kelompok terorisme melakukan aksinya terhadap AS. Cakupan strategi NSS yang belum spesifik dalam menangani ancaman terorisme, maka beberapa bulan setelahnya turut dibentuk *National Strategy for Countering Terrorism (NSCT)*. NSCT ditujukan untuk menciptakan lingkungan dunia yang tidak ramah terhadap terorisme dan setiap aktor pendukung terorisme yang berfokus untuk menghentikan serangan terorisme terhadap AS, kepentingan

nasional AS, serta serangan terhadap sekutu AS di seluruh dunia (Ramakrishna 2005).

Peristiwa tersebut turut mendorong pertumbuhan besar-besaran terhadap peningkatan institusi dan pengaruh signifikan terhadap studi kajian terorisme, diantaranya yaitu:

Tabel 2.1 Pertumbuhan Institusi Studi Kajian Terorisme

No	Peningkatan Institusi / Studi Terorisme	Hasil
1.	Pertumbuhan lembaga <i>think tank</i> atau lembaga penelitian di dunia	<ul style="list-style-type: none"> a. National Consortium for the Study of Terrorism and Response to Terrorism (START) b. The National Counterterrorism Center (NCTC) c. The International Center for Political Violence and Terrorism Research (ICPVTR) d. The International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR).
2.	Jaringan asosiasi intelektual studi terorisme	<ul style="list-style-type: none"> a. Terrorism Research Initiative (TRI) b. The Society for Terrorism Research (STR) c. The BISA Critical Studies on Terrorism Working Group (CSTWG).
3.	Pendanaan atau investasi secara gencar terhadap penelitian terorisme oleh pemerintah maupun swasta	
4.	Pertumbuhan signifikan terhadap pakar terorisme yang tampil di media dan pengadilan kriminal secara mencolok terhadap pelaku terorisme.	
5.	Peran kuat pakar terorisme sebagai penasihat kebijakan publik	

Sumber: Uluslararası İlişkiler (2012).

Kebijakan AS pada era Obama nampaknya berbeda dan tak begitu agresif seperti Bush, hal tersebut terlihat melalui sikapnya yang populis untuk berupaya meredam citra buruk AS terhadap HAM pada masa Bush dalam memberantas terorisme (Haqqi 2012). Realisasi janji Obama pasca terpilih menjadi Presiden untuk memberikan harapan dan perubahan terhadap orientasi wacana melawan terorisme yang lebih humanis dan patuh terhadap supremasi hukum, terimplementasi dalam tiga perintah eksekutif yaitu *Executive Order* 13491 yang melarang penggunaan penyiksaan terhadap interogasi tersangka teroris, *Executive*

Order 13492 untuk menutup pusat penahanan Guantanamo, serta *Executive Order* 13493 tentang penetapan tugas antar lembaga untuk melakukan peninjauan kebijakan penahanan pemerintahan Bush (Starr-Dellen and Pazos 2018).

Laporan *-Empowering Local Partners to Prevent Violent Extremism in the Unites States* yang dikeluarkan pemerintahan Obama pada 2011 menunjukkan keseriusan AS untuk berfokus pada upaya melawan ancaman teror domestik. Melalui *Countering Violent Extremism* (CVE) terdapat tiga program yang dapat dilakukan ditingkat masyarakat demi mengatasi ekstremisme yaitu membangun kesadaran, melawan narasi ekstremisme, hingga menekankan intervensi yang dipimpin oleh komunitas (Starr-Dellen and Pazos 2018). Dalam menjalankan strategi nasional CVE dalam melawan teroris, terdapat empat lembaga federal yang memiliki kewenangan untuk membentuk rencana atau program antar lembaga serta melakukan koordinasi yaitu *Department of Justice* (DoJ), *Department of Homeland Security* (DHS), *National Counter Terrorism Center* (NCTC), dan *Federal Bureau of Investigation* (FBI). Obama juga mengeluarkan *Strategic Implementation Plan* dalam menugaskan berbagai aktor strategi nasional ke berbagai lembaga federal sebagai upaya antara hubungan lembaga federal dan masyarakat (Schanzer and Eyerman 2019).

Pada ranah internasional, upaya Obama untuk mendesak negara lainnya dalam memberantas ekstremisme pada pidatonya di Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2014 kemudian membuahkan hasil, pada tahun 2015 AS menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) CVE yang membahas cara efektif deradikalisasi kelompok esktrémisme dan dihadiri oleh 70 negara lebih (Starr-Dellen and Pazos 2018). Obama menggunakan pendekatan yang lebih

sempit untuk mendefinisikan tujuan kebijakan kontra-terorismenya secara spesifik terhadap Al-Qaeda dan jaringannya, tak seperti Bush yang menyatakan perang terhadap terorisme di seluruh dunia (Ganor 2014). Selain itu, Obama juga berupaya untuk meningkatkan hubungannya dengan negara-negara Islam seperti Mesir, Indonesia, Turki, Arab Saudi, dan lainnya (Haqqi 2012).

Kebijakan AS dalam melawan terorisme di era Trump cenderung terlihat retorik yang mengacu pada slogan *-America First*. Slogan Trump menggambarkan kebijakan AS untuk bersikap isolasionis pada politik internasionalnya dan lebih menekankan sikap nasionalis pada kebijakan domestik (Vedaschi and Noberasco 2021). Retorika *-America First* terhadap strategi melawan terorisme diimplementasikan Trump melalui kebijakan domestiknya demi memproteksi ancaman terorisme yang berasal dari luar AS. Penggunaan istilah kontroversial *-Radical Islamic Terrorism* secara tidak langsung telah memperlihatkan sentimen negatif Trump bahwa terorisme memiliki keterkaitan dengan Islam (Biegon and Watts 2020). Pernyataan Trump terhadap orientasi agenda AS dalam melawan terorisme erat kaitannya dengan sentimen terhadap Islam dan anti-imigran hingga berlanjut pada penetapan kebijakan *Travel Ban* demi memproteksi AS dari ancaman terorisme luar.

Pasca kenaikannya menjadi presiden AS, pada 27 Januari 2017 penandatanganan *Executive Order 13769* merupakan implementasi pertama kebijakan larangan imigran (Starr-Dellen and Pazos 2018). Kebijakan sentimen negatif terhadap Islam berlanjut untuk melarang imigran yang berasal dari beberapa negara mayoritas Muslim seperti Iran, Irak, Suriah, Yaman, Somalia, Sudan, dan Libya (Hellmuth 2021). Kebijakan proteksi tetap dikeluarkan kembali

melalui *Executive Order* 13780 pada 6 Maret 2017 dan Proklamasi Presiden 9645 pada 24 September 2017, meskipun kebijakan tersebut dianggap melanggar Konstitusi AS (Starr-Dellen and Pazos 2018). Selain Kebijakan *Travel Ban*, pada akhir 2018 Trump menggunakan perspektif pertahanan dan keamanan domestik yang serupa dengan Obama, meskipun tindakan dan retorika yang digunakan oleh Trump terbukti bertentangan dengan Obama, sebab tindakan kontra-terorisme Trump secara umum telah melanggar HAM dan kebebasan baik di dalam dan di luar negeri (Vedaschi and Noberasco 2021).

Dalam agenda luar negerinya, Trump memperluas penggunaan drone bersenjata, memperdalam penggunaan *Special Operation Force* (SOF), serta memperluas pendanaan *Department Of Defense* (DoD) melalui kerja sama kontra-terorisme (Biegon and Watts 2020). Ancaman terorisme yang masih terjadi pada masa pemerintahan Trump membentuk pandangan bahwa terorisme dianggap secara eksklusif sebagai masalah kebijakan luar negeri dan militer, serta wajib ditangani baik di perbatasan dalam negeri maupun luar negeri melalui kekerasan (Vedaschi and Noberasco 2021).

2.2 Kerja Sama Indonesia-AS dalam Penanganan Terorisme

2.2.1 Tahun 2001-2004

Agenda AS dalam *War on Terror* menjadi momentum penting bagi kedua negara dalam menjalankan kerja sama kontra-terorisme. Pertemuan antara Presiden Megawati dan Presiden George W Bush tahun 2001 di AS dapat dilihat sebagai titik terang masuknya kerja sama Indonesia-AS dalam memberantas terorisme secara signifikan dan terus ditingkatkan pada pemerintahan presiden

selanjutnya (Marshall, Picou, and Gill 2003). Pernyataan Megawati pada kunjungannya 19 September 2001 ke AS untuk mendukung penuh upaya AS dalam kerja sama pemberantasan terorisme disambut baik oleh Bush. Respons positif AS menghasilkan rencana pembaharuan hubungan militer kedua negara yang sempat terhambat, janji pencabutan embargo militer, hingga pembentukan dialog dalam sektor keamanan Indonesia-AS (Sukma 2003, 132). Rencana pembentukan forum dialog kedua negara dalam membahas berbagai isu keamanan, tak lama akhirnya terwujud dan forum tersebut terus berlangsung hingga era Presiden Joko Widodo. Pelaksanaan *Indonesia-US Security Dialogue* (IUSSD) tahun 2002 menjadi bukti nyata implementasi dialog keamanan bilateral yang didalamnya mencakup kunjungan tingkat menteri dan pejabat tinggi dalam peningkatan intensitas komunikasi dan kerja sama kedua negara (Sukadis 2018).

Kedua pemerintah turut membentuk kerja sama secara konkret dalam penanganan ancaman terorisme. Pertemuan Megawati-Bush melahirkan kerja sama bantuan program AS melalui *Anti-Terrorism Assistance* (ATA) yang bertujuan untuk pengembangan kapasitas Indonesia dalam melawan terorisme. Komitmen AS dalam membantu penanganan terorisme di Indonesia dibuktikan melalui bantuan dana sebesar \$3,5 juta pada tahun 2003 untuk pembangunan fasilitas pelatihan, hingga tahun 2007 bantuan pemberian AS melalui ATA mencapai \$32.9 juta (Kusuma, Warsito, Surwandono, Muhammad, et al. 2019). ATA yang telah berjalan sejak 2003 menaruh kontribusinya dalam pembentukan dan pelatihan satuan anti-teror Densus 88 pada tahun 2004 (Kedang 2017).

Pada sektor militer, program *Combating Terrorism Fellowship Program* (CTFP) yang dibentuk tahun 2002 ditujukan untuk pembangunan kapasitas

Indonesia dalam melawan ancaman terorisme baik pada tingkat nasional, regional, hingga global (Kusuma, Warsito, Surwandono, Muhammad, et al. 2019). CTFP merupakan program pelatihan aparat militer dan intelijen untuk memahami bentuk, ancaman, dan deteksi dalam kontra-terorisme (Sukadis 2018). Pandangan yang sama Megawati-Bush dalam melihat isu terorisme, namun keduanya memiliki perbedaan dalam arah kebijakannya. Bush saat itu lebih menekankan pada agenda internasionalnya sedangkan Megawati lebih berfokus pada penanganan dalam negeri, namun hal tersebut tidak menjadi rintangan kedua negara dalam memberantas terorisme bersama (Matondang 2016).

2.2.2 Tahun 2004-2014

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak 2004-2014, semakin terlihatnya peningkatan kerja sama pertahanan Indonesia-AS baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai kerja sama yang telah dijalankan pada sektor pertahanan, keduanya juga memiliki persepsi yang sama dalam menyadari bahwa ancaman terorisme menjadi isu penting dalam melindungi keselamatan dan kedaulatan bangsa (Sukadis 2018). Berbagai insiden pengeboman yang terjadi sejak masa awal pemerintahan SBY menjadi tantangan besar dalam membangun kembali citra baik Indonesia. Penting apabila pemerintah saat itu perlu menegaskan bahwa gerakan terorisme di Indonesia bukanlah didasari atas faktor agama (Islam), namun terorisme memiliki hakikat bahwa mereka merupakan *public enemy* dan berlanjut pada penawaran SBY untuk meluruskan pandangan AS tentang Islam melalui dialog antar tokoh Islam Indonesia dengan pemerintah AS (Pratiwi 2016). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintahan SBY mencoba untuk memperkuat hubungan bilateral dengan

negara-negara Barat yang memiliki pengaruh dalam tatanan politik dunia (Hidayat 2018).

Kunjungan SBY ke AS pada tahun 2005 membuahkan hasil terhadap kerja sama kedua negara. Pertemuan SBY dengan Bush menghasilkan pernyataan dalam mempererat kerja sama di berbagai bidang termasuk kontra-terorisme, serta komitmen Bush untuk melakukan normalisasi kerja sama militer yang sebelumnya sempat terhenti (Sukadis 2018). Kedekatan antara AS-Indonesia di era SBY-George W Bush pun menghasilkan pencabutan embargo militer yang dilakukan oleh AS terhadap Indonesia pada tahun 2005 serta pencabutan *travel warning* AS terhadap Indonesia pada tahun 2008 (Hidayat 2018).

Hubungan SBY dengan AS terlihat meningkat secara signifikan sejak tahun 2005. Pada tahun 2005, kerja sama kontra-terorisme terhadap pengembangan keterampilan Densus 88 diimplementasikan melalui *Regional Defence Counter Terrorism Fellowship Programs (RDCTFP)* seperti kerja sama intelijen dalam melawan terorisme dan promosi kerja sama keamanan melalui seminar kontra-terorisme. Pada tahun 2007, kerja sama keduanya terus ditingkatkan melalui berbagai program untuk menangani ancaman terorisme. Pemerintah US melalui *Non-Proliferation Anti-Terrorism Demining and Related Programs Anti-Terrorism Assistance (NADR-ATA)* telah membantu peningkatan investigasi, komando dan kontrol, kapasitas manajemen Polri dalam memperluas penanganan terorisme, serta rencana peningkatan pelatihan kontra-terorisme maritim (Seniwati and Alimuddin 2016).

Peningkatan intensitas kerja sama Indonesia-AS era SBY semakin dibuktikan melalui kunjungan Obama ke Indonesia. Pada November 2010,

peningkatan kerja sama keduanya dalam sektor pertahanan kemudian tercantum pada pengaturan kerangka kerja sama di bidang pertahanan antara Kementerian Pertahanan RI dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui *-Framework Arrangement on Cooperative Activities In the Field of Defence Between the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia and Department of Defense of the United States of America* (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2015, 83). Penguatan kerja sama tersebut menjadi hal penting terhadap peningkatan kapasitas militer dan aparat keamanan demi menghadapi isu terorisme yang menjadi salah satu perhatian penting bersama dalam kerja sama keduanya (Sukadis 2018).

Kebijakan kedua negara dalam menangani isu terorisme terlihat bahwa keduanya menggunakan strategi serupa. Pemerintahan SBY kala itu menerapkan prinsip *“zero enemy, million friends”* yang lebih mengedepankan kerja sama serta forum komunikasi dan negosiasi dalam menyelesaikan masalah keamanan, begitu juga pemerintahan Obama yang menegaskan bahwa berbagai masalah keamanan tidak dapat ditangani sepenuhnya tanpa kerja sama dengan negara lain. Berdasarkan pernyataan Departemen Luar Negeri (Deplu) dan Departemen Pertahanan (Dephan) AS ke Kongres, fokus Indonesia-AS yang sama dalam memandang isu terorisme melalui kerja sama kerap menjadi salah satu alasan hubungan kerja sama keduanya, sebab Indonesia memiliki dampak langsung terhadap isu terorisme yang menjadi salah satu agenda strategis AS (Sukadis 2018).

Kepercayaan dunia internasional atas Indonesia memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi Indonesia untuk memainkan perannya secara masif.

Strategi politik luar pemerintah era SBY dalam menyuarakan Islam moderat di ranah bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai forum intensif dialog antar kepercayaan, budaya, dan peradaban membentuk kepercayaan antar perbedaan yang terjadi. Pencapaian pemerintah Indonesia dalam menyuarakan Islam moderat di ranah internasional turut menjadikan Indonesia sebagai *role model* negara muslim terbesar yang kemudian dapat menjembatani dunia Barat dan Islam serta membangun demokratis yang stabil (Lumbangaol 2021).

2.2.3 Tahun 2015-2019

Pada tahun 2015, agenda kerja sama Indonesia-AS secara umum dibahas melalui kerangka kerja sama sektor pertahanan yang disepakati antara Kemhan RI dan Departemen Pertahanan AS melalui *-Framework Arrangement on Cooperative Activities In the Field of Defence Between the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia and Department of Defense of the United States of America* yang telah ditandatangani pada tahun 2010 (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2015, 83). Namun pemerintahan Jokowi meningkatkan kerangka kerja sama tersebut melalui pernyataan kerja sama komprehensif.

Pertemuan antara Joko Widodo dan Barack Obama pada 26 Oktober 2015 menegaskan bahwa kedua negara berkomitmen untuk mempererat kerja sama dalam bidang pertahanan. Komitmen tersebut dibuktikan melalui *Joint Statement on Comprehensive Defense Cooperation*, dan disetujui oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dan Departemen Pertahanan AS. Kedua Presiden menggarisbawahi komitmen untuk memperdalam kerja sama dalam bidang-bidang seperti; kerja sama maritim; penjaga perdamaian; bantuan kemanusiaan dan bencana; penelitian dan pengembangan pertahanan gabungan; melawan

ancaman transnasional; serta profesionalisasi militer (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia 2015). Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, pengembangan kerja sama tersebut meliputi; dialog dan konsultasi bilateral terkait isu keamanan yang menjadi perhatian bersama, pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan SDM terhadap institusi pertahanan dan Angkatan Bersenjata, proyek pembangunan kapasitas tentang keamanan maritim, hingga kerja sama logistik dan persediaan militer. Lebih lanjut, implementasi kerja sama dilakukan melalui beberapa forum dan program seperti *Indonesia-United States Security Dialogue* (IUSSD), *United States-Indonesia Bilateral Defense Dialogue* (USIBDD), *Military Assistance Program* (MAP), *International Military Education and Training* (IMET), *Foreign Military Sales* (FMS), dan *Foreign Military Financing Program* (FMFP) (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2015, 83).

Pada tahun 2017, upaya peningkatan kerja sama dalam memberantas terorisme juga kembali dibahas. Pertemuan antara Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden AS, Michael Pence membahas mengenai beberapa kerja sama antara Indonesia-AS dalam berbagai bidang, salah satunya kerja sama dalam menangani terorisme. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya kepada komitmen AS untuk tidak memusuhi Islam dan melakukan kerja sama dengan Negara muslim untuk memerangi terorisme; penyampaian Presiden RI bahwa berkurangnya pergerakan ISIS di Syria dan Iraq mengharuskan kedua Negara memberikan perhatian ekstra kepada pergerakan mereka di daerah lain termasuk Asia Tenggara; serta harapan Presiden RI kerja sama penanggulangan terorisme melalui pertukaran informasi intelijen, penghentian aliran dana, pemberdayaan

masyarakat moderat dan penyebaran kontra narasi dapat dilakukan oleh kedua negara (Kementerian Sekretariat Negara RI 2017).

Pada tahun 2018, peningkatan kerja sama Indonesia-AS dalam menangani terorisme berlanjut melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 14 September 2018. MoU tersebut berisikan kesepakatan kerja sama antara Indonesia dengan AS dalam memperkuat kerja sama untuk mengatasi terorisme yang ditandatangani oleh Koordinator urusan Kontra-terorisme dari Departemen Luar Negeri Amerika, Nathan A Sales, dan kepala BNPT Indonesia, Komisariss Jenderal Suhardi Alius. Kesepakatan antara Indonesia-AS menghasilkan kerja sama kedua negara dalam bidang kontra-terorisme seperti menghadapi ekstremis kekerasan dengan cara meningkatkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, serta dengan cara membangun kemampuan menghadapi kontra-terorisme dan esktremis melalui pelatihan dan pendidikan bersama (VOA Indonesia 2018).

Implementasi MoU tahun 2018 dibuktikan melalui pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas dan pembekalan personel TNI/Polri dan Instansi terkait dalam rangka mendukung penanggulangan terorisme di wilayah perbatasan dan pulau terluar pada 4-5 September 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kedubes AS di Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh narasumber dari Indonesia dan AS a.l. *State Department, Department of Homeland Security* dan *Federal Bureau of Investigation* (FBI), serta perwakilan TNI, Polri, Kemenkumham, Ditjen Bea Cukai, PT. Angkasa Pura II, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim, Bapeten, BIN, Kemlu, dan Kemendagri (Direktorat Amerika I 2019).

Pada tanggal 5 Juli 2019, kerja sama kontra-terorisme kembali dibahas melalui penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) Kerja Sama Timbal-Balik dalam Pengembangan Kapasitas serta Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional antara Polri dan FBI yang menjadi salah satu prioritas kerja sama RI-AS di bawah Kemitraan Strategis. Kesepakatan tersebut mencakup kerja sama di bidang pemberian dan pertukaran informasi, pengembangan dan pelaksanaan program kerja sama teknis, pelaksanaan pelatihan, kursus dan pertukaran tenaga ahli dan SDM, serta bantuan teknis mengenai penanggulangan kejahatan transnasional yang terdiri atas terorisme, organisasi kriminal terorganisir, perdagangan manusia, pencucian uang, kejahatan dunia maya, kejahatan ekonomi internasional, korupsi, perdagangan senjata ilegal, hingga kejahatan lingkungan (Direktorat Amerika I 2019).

BAB 3

PENGARUH FAKTOR POLITIK DOMESTIK, KAPABILITAS EKONOMI DAN MILITER, SERTA KONTEKS INTERNASIONAL TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA

3.1 Politik Domestik

Menurut William D. Coplin, pengambil kebijakan merupakan orang yang dihadapkan pada situasi tertentu dan memiliki tanggung jawab, serta ditekan beragam kondisi untuk mengambil keputusan terhadap arah kebijakan luar negeri. Kondisi politik domestik menjadi aspek vital pengambil keputusan untuk mempertimbangkan keputusan luar negeri yang akan dibentuk. Pembentukan kebijakan luar negeri merupakan sebuah proses atas hasil kondisi politik domestik yang diperankan oleh berbagai aktor dan hubungannya dengan pengambil keputusan (Coplin 1992, 74).

Aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku pengambil keputusan politik luar negeri dalam merumuskan kebijakannya dengan istilah *policy influencers* atau pemberi pengaruh kebijakan. Hubungan antara pemberi pengaruh kebijakan dengan pengambil keputusan dapat disebut dengan *policy influence system* atau sistem pengaruh kebijakan. Dalam sistem pengaruh kebijakan, terjadi timbal balik antara pengambil keputusan kebijakan luar negeri dengan pemberi pengaruh kebijakan. Coplin menegaskan bahwa sistem pengaruh kebijakan di negara mana pun dapat dianggap sebagai sebuah rangkaian hubungan timbal balik yang sangat kompleks antara pengambil keputusan dengan pemberi pengaruh terhadap kebijakan (Coplin 1992, 75).

Pengambil keputusan membutuhkan para pemberi pengaruh kebijakan sebagai sumber dukungan bagi rezim pemerintahan, sebab mereka bergantung pada dukungan yang diberikan seperti kesetiaan angkatan bersenjata, dukungan finansial pengusaha, hingga dukungan rakyat dalam pemilihan umum. Dukungan yang diberikan memainkan peran signifikan untuk membuat posisi pengambil keputusan lebih pasti dan menjadi referensi dalam merumuskan kebijakannya. Selanjutnya, Coplin mengklasifikasikan *policy influencers* menjadi empat tipe aktor, yakni *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer* (Coplin 1992, 81).

3.1.1 Luhut Binsar Pandjaitan sebagai *Bureaucratic Influencer*

Bureaucratic influenceer atau pemberi pengaruh kebijakan birokratik merupakan berbagai individu atau organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang memiliki tugas untuk membantu pengambil keputusan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakannya. Birokrat sangat berpengaruh sebab mereka mempunyai akses langsung kepada pengambil keputusan, sehingga pengambil keputusan bergantung pada birokrat untuk mendapatkan informasi penting bagi proses pembuatan kebijakan dan bantuan terhadap kebijakan yang akan dibentuk. Coplin menambahkan bahwa kelompok birokratis sering kali memainkan perannya di belakang layar melalui pemberian informasi kepada pengambil keputusan dan digunakan sebagai alat bagi pembuatan keputusan (Coplin 1992, 82-83).

Dalam melihat hubungan aktor birokratik politik domestik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme, dapat dilihat melalui peran Luhut

Binsar Pandjaitan. Luhut Binsar Pandjaitan atau kerap dikenal dengan sebutan Luhut merupakan seorang Pensiunan Jenderal TNI. Luhut sering disebut sebagai -Menteri segala urusan karena deretan jabatan yang dipegangnya dan dikenal sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahannya. Kedekatan Luhut dengan Jokowi dapat dilihat sebagai sosok penasihat terdekat Jokowi dalam masalah keamanan nasional (L. Connelly 2015).

Berbagai pencapaian prestasi sejak awal karir militer hingga pangkat Jenderal dalam hal penanganan terorisme telah terbukti. Dapat dilihat melalui kememimpinannya dalam Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada masa pemerintahan Soeharto yang berhasil mengembangkan berbagai keahlian khusus dalam kontra-terorisme, serta menjadi pendiri dan pemimpin pertama unit elit anti-teror Detasemen 81 pada tahun 1980-an (sekarang dikenal dengan Sat-81/Gultor) yakni salah satu pasukan khusus penanggulangan terorisme terbaik di dunia. Dalam karir pemerintahan, sebelum memegang berbagai jabatan pada pemerintahan Jokowi, Luhut pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura tahun 1999-2000 serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia tahun 2000-2001. Pada bidang politik, Luhut juga terlibat dalam Partai Golongan Karya dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan antara tahun 2008-2014 (L. Connelly 2015).

Pengaruh Luhut terhadap Jokowi tak dapat diragukan lagi. Luhut memiliki pengaruh besar dalam memberikan dukungan pada Pemilu 2014 untuk mendukung Jokowi sebagai Presiden melalui tim kampanye Bravo 5. Tak disebutkan berapa biaya yang telah dikeluarkan, namun dukungan finansialnya telah membantu menjaga kampanye Jokowi untuk tetap berjalan (L. Connelly

2015). Dukungan kuat Luhut terhadap Jokowi terlihat melalui berbagai kesempatan pada publik untuk menjelaskan secara rinci tujuan Jokowi apabila terpilih menjadi presiden (Panuju 2019). Kedekatan Luhut dengan presiden semakin meningkat pada tahun 2014-2019. Peran Luhut sebagai sosok kepercayaan Jokowi terlihat melalui berbagai jabatan, mulai dari Kepala Staf Kepresidenan tahun 2014-2015, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) tahun 2015-2016, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2016-2019, hingga Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral antara tanggal 15 Agustus-14 Oktober 2016 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2022).

Ketika menjabat sebagai Menkopolhukam, Luhut menyatakan bahwa terdapat kesulitan untuk melakukan dugaan terhadap pergerakan kelompok teroris, sebab mereka tidak menggunakan alat komunikasi dan bergerak melalui kelompok-kelompok kecil serta melakukan dugaan terhadap kelompok teroris lebih sulit dibandingkan dengan operasi militer (Sujasmin 2017). Posisi penting Menkopolhukam sebagai koordinator memiliki kewenangan yang lebih tinggi terhadap lembaga Kemhan dan Kemlu, sehingga ia memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi kebijakan kontra-terorisme secara domestik maupun kerja sama luar negeri (Connelly 2014). Lebih lanjut, pertemuan antara Duta Besar AS untuk Indonesia, Robert Orris Blake dengan Luhut di Kantor Kemenpolhukam menghasilkan pembahasan penting terkait isu Laut Tiongkok Selatan dan kerja sama sektor keamanan antara Indonesia-AS (Utama 2015). Pernyataan Luhut terkait sulitnya melakukan dugaan pergerakan kelompok teroris, kewenangan yang lebih tinggi sebagai koordinator, hingga pembahasan kerja sama sektor

keamanan dengan AS, semakin memperlihatkan bahwa Luhut berperan penting dalam kebijakan kontra-terorisme pemerintah Indonesia, serta pentingnya keputusan peningkatan kerja sama kontra-terorisme dengan AS.

Pengaruh aktor birokratik tak hanya diperankan oleh Luhut, melainkan terdapat peran BNPT sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah, serta menjadi institusi yang paling dominan terhadap penanggulangan terorisme. Dalam konteks penindakan terorisme, Polri bertindak sebagai komponen utama dan TNI sebagai komponen pendukung yang diatur di dalam OMSP di bawah koordinasi BNPT. Implementasi penanggulangan terorisme mulai dari kebijakan penindakan, penegakan hukum, hingga pencegahan berada di bawah koordinasi BNPT yang bertugas untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. BNPT juga menjadi *leading sector* yang mengkoordinasi segala potensi sumber daya pemerintah dalam upaya pencegahan terorisme untuk merumuskan arah kebijakan pencegahan radikalisme dan terorisme berjalan baik (BNPT 2021). Selain itu, BNPT juga memiliki tugas dan fungsi pokok dalam merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional (BNPT 2019a). Kewenangan BNPT sebagai institusi paling dominan dan kewenangan di bidang kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme, tidak serta merta menjadikan lembaga tersebut sebagai aktor birokratik utama yang mampu memberikan pengaruh besar terhadap keputusan kerja sama kontra-terorisme, sebab BNPT dikoordinasikan di bawah Menkopolkam dan bertanggung jawab

kepada presiden (BNPT 2019a). Jabatan Luhut sebagai Menkopolkam di atas BNPT serta kewenangan yang lebih tinggi terhadap Kemhan dan Kemlu menjadikannya sebagai aktor birokratik utama yang paling berpengaruh dalam penentuan keputusan pemerintah Indonesia terkait kebijakan kerja sama kontra-terorisme.

Pada kebijakan luar negeri, meskipun arah kebijakan ditentukan oleh presiden namun isu-isu kritis suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh Luhut sebagai penasihat kebijakan luar negerinya, pendekatan kolaboratif yang digunakan Luhut untuk terlibat dalam forum multilateral bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama (Choir 2021). Pasca diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Luhut memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan luar negeri dan dalam negeri, mempercepat pengembangan kebijakan, serta meminta Kemlu untuk mengirimkan diplomat karir untuk mengemban jabatan wakil kepala staf urusan internasional, hal ini dapat dilihat sebagai upaya Luhut untuk memberikan pengaruh yang lebih besar dalam ranah kebijakan luar negeri (L. Connelly 2015). Dalam hal kontra-terorisme, latar belakang Luhut semakin memastikan posisi pemerintah untuk tetap melakukan kerja sama kontra-terorisme yang sebelumnya menjadi fokus pada pemerintahan SBY (Connelly 2014).

Respons serius terhadap penanganan terorisme domestik dibuktikan melalui pernyataan Luhut pada tahun 2016 di kantor Kemenpolhukam yang menginginkan proses revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dipercepat (Kandi and Satyaningtyas 2016). Menpolhukam menaruh harapan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk

memberikan tanggapan positif terkait rencana revisi UU tersebut (Waluyo 2016). Hal itu ditujukan untuk memperkuat kewenangan aparat penegak penanggulangan terorisme dalam melakukan penangkapan para pelaku teror. Luhut juga sempat menyatakan rencana peningkatan dana penanggulangan terorisme senilai 1 Miliar rupiah pertahun di setiap provinsi melalui program Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di bawah BNPT (Lindawaty 2016).

Dapat dilihat bahwa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kerja sama dengan AS dalam kontra-terorisme dipengaruhi oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Kedekatan Luhut dengan Jokowi sebagai sosok kepercayaannya membuktikan bahwa ia memainkan peran *bureaucratic influencernya* dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia. Relevan dengan pandangan Coplin bahwa pemberi pengaruh kebijakan birokratik sangat berpengaruh karena mereka dekat dan mempunyai akses langsung kepada pengambil keputusan, sehingga para pengambil keputusan mendapatkan informasi penting bagi proses pembuatan kebijakan luar negerinya (Coplin 1992, 82-83).

Peran Luhut terlihat tepat berdasarkan latar belakangnya di militer, politik, dan pemerintahan, kedekatan dengan Jokowi pada kabinet 2014-2019, respons terhadap isu terorisme, hingga jabatan strategisnya sebagai Menkopolkam. Selain itu, kepercayaan Jokowi untuk mengangkat Luhut dalam berbagai posisi strategis pemerintahan dinilai penting, sebab ia dianggap sebagai penghubung saluran penting militer hingga bantuan terhadap Jokowi dalam memperkuat posisi pemerintahannya (Syailendra 2016).

3.1.2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai *Partisan*

Influencer

Partisan influecer atau partai yang mempengaruhi pengambil keputusan merupakan partai politik suatu negara bertujuan untuk menerjemahkan berbagai tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis, yakni tuntutan kepada para pengambil keputusan yang mengacu pada kebijakan pemerintah. Partai politik berupaya memberikan pengaruhnya dengan cara menekan pengambil keputusan, serta menyediakan aktor-aktor yang dapat berperan dalam pengambilan kebijakan (Coplin 1992, 84). Partai memiliki peran terbatas akibat fokusnya terhadap kondisi politik domestik, namun mereka tetap memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Para pengambil keputusan dianggap penting oleh partai, hal itu disebabkan karena pentingnya pemilihan umum, sehingga mereka memprioritaskan dukungannya kepada rezim pemerintahan (Coplin 1992, 103).

Dalam melihat hubungan aktor partai politik domestik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia untuk tetap melakukan kerja sama kontra-terorisme dengan AS, dapat dilihat melalui peran PDIP. PDIP menaruh konsistensi dukungan terhadap Jokowi sejak Pemilihan Kepala Daerah Walikota Solo tahun 2005, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, hingga kemenangannya pada Pemilihan Presiden tahun 2014. Dalam kekuasaan legislatif, pada tahun 2014 PDIP berhasil menguasai sebanyak 109 kursi dari 560 kursi atau sekitar 19,5 %. Partai politik yang mendapatkan posisi mayoritas pada legislatif bertugas untuk menghubungkan negara dengan masyarakat, sehingga mereka memiliki wewenang lebih dalam perumusan kebijakan (Zuhri, Delianoor, and

Rahmatunnisa 2018). Atas kemenangannya, PDIP memiliki pengaruh kuat untuk memainkan perannya dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Kekuasaan pada dua lembaga tinggi pemerintahan memberikan dampak signifikan terhadap PDIP untuk mempengaruhi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan luar negerinya.

Jokowi tidak memiliki jabatan tinggi dalam PDIP yang dipimpin oleh Megawati. Pada tahun 2014, Megawati berusaha meminimalkan peran Jokowi dalam pengambilan keputusan melalui pernyataannya menjelang kampanye bahwa Jokowi hanya seorang petugas partai yang bertugas menjalankan ideologinya (Connelly 2014). Sosok yang berada di dekat Jokowi dalam kepemimpinan PDIP adalah Andi Widjayanto yang diangkat menjadi Sekretaris Kabinet. Regenerasi kesetiaan ayahnya (politikus senior PDIP) terhadap Megawati dilanjutkan dan ditunjukkan melalui pandangannya dalam sektor pertahanan bahwa ia memiliki kecenderungan nasionalis yang kuat dan dikenal sebagai salah satu penasihat Jokowi yang paling sulit diakses oleh diplomat asing (L. Connelly 2015). Hal itu tentu cukup berpengaruh dalam pertimbangan kebijakan pemerintah untuk bersikap protektif terhadap ancaman terorisme. Relasi Jokowi dengan PDIP dalam pengaruh kekuasaan semakin terlihat pasca penempatan empat Menteri dalam kabinetnya yang berasal dari PDIP, sehingga posisi partai pasca kemenangan kontestasi Pilpres lebih strategis. Berkat kedekatan Rini Soemarno dan Lukman Hakim dengan Megawati berhasil menempatkan mereka dalam kabinet, maka terlihat jelas peran PDIP dalam memberikan pengaruh yang besar (Zuhri, Delianoor, and Rahmatunnisa 2018).

Dukungan PDIP dalam melawan terorisme dapat dilihat melalui pertemuan antara Pemerintah dan DPR terhadap kesepakatan dalam mempercepat revisi UU tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang sebelumnya direncanakan Jokowi. Pertemuan pada tahun 2018 tersebut dihadiri oleh Sekjen Partai Koalisi Pemerintah, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto (BNPT 2019b). Dalam proses Rancangan UU terorisme, PDIP juga meminta saran salah satu tokoh agama yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H Ma'ruf Amin. Selain itu, Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan berbagai partai politik seperti Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Golkar Lodewijk Paulus, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Waketum PAN Bara K. Hasibuan, Sekjen Hanura Herry Lontung, Ketua Fraksi Golkar Melchias M. Mekeng, Ketua Fraksi PKB Cucun A. Syamsulrijal, dan Ketua Fraksi PPP Reni Maulinawati (BNPT 2019b). Berbagai petinggi partai politik yang tergabung dalam DPR juga sepakat dengan pemerintah terhadap pelibatan TNI bagi pemberantasan terorisme, namun pengaturan terhadap mekanisme peran TNI diserahkan kepada presiden melalui Peraturan Presiden. Berbagai partai politik yang tergabung dalam DPR memegang peran penting dalam menentukan arah politik hukum pemberantasan terorisme karena terdapat konfigurasi kekuatan politik (Kartika 2018). Oleh karena itu, kesepakatan percepatan Revisi UU terorisme yang dihadiri oleh berbagai petinggi partai politik serta kesepakatan mengenai mekanisme pelibatan dan peran TNI menjadi poin penting bahwa partai politik lainnya (selain PDIP) menaruh keterlibatan terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani terorisme.

Pengaruh partai tak hanya dimainkan melalui kedekatan pada kekuatan legislatif dan eksekutif. Sosok Megawati sebagai pendahulu Jokowi dalam tahta kepemimpinan dapat memberi pengaruh langsung terhadap kebijakan kerja sama kontra-terorisme dengan AS yang sempat dilakukan pada pemerintahannya. Megawati menaruh kontribusi penting sebagai pembuka jalur kerja sama kontra-terorisme Indonesia-AS. Keseriusan Megawati melalui berbagai upaya dapat menjadi acuan Jokowi dalam formulasi kebijakan kontra-terorisinya. Sebagai juniornya dalam partai dan pemerintahan, presiden dapat mengikuti jejak pendahulunya. Terutama dalam hal kebijakan luar negeri, dukungan penuh Megawati terhadap agenda melawan terorisme bersama Bush dan berbagai kebijakan kerja sama kontra-terorisinya dengan AS dapat menjadi tolak ukur Jokowi agar tetap melakukan kerja sama yang telah lama terjalin dan berdampak positif bagi penanganan terorisme di Indonesia.

Dapat dilihat bahwa kebijakan luar negeri pemerintahan Indonesia pada meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS dipengaruhi oleh PDIP. Coplin berpendapat bahwa partai berupaya memberikan pengaruhnya dengan cara menekan pengambil keputusan, serta menyediakan aktor-aktor yang dapat berperan dalam pengambilan kebijakan (Coplin 1992, 84). Terlihat jelas apabila dikaitkan dengan dominasi kekuasaan partai yang mendapatkan berbagai posisi strategis legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan. Posisi pengambil keputusan dalam pandangan partai dianggap penting, hal itu disebabkan karena pentingnya pemilihan umum, sehingga mereka memprioritaskan dukungannya kepada rezim pemerintahan (Coplin 1992, 103).

. Terlepas dari posisi presiden Jokowi yang hanya dianggap sebagai petugas partai, namun PDIP menaruh konsistensi dalam mendukungnya hingga meraih kemenangan Pilpres, serta dominasi partai pada kekuasaan legislatif dan eksekutif memiliki otoritas tinggi dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah 2015-2019. Anggota PDIP mendapatkan posisi-posisi strategis dalam kabinet pemerintahan. Kemenangan presiden yang berasal dari anggota partai akan memudahkan komunikasi politik antara para petinggi partai dengan presiden, selain itu persamaan ideologi, visi dan misi keduanya dapat tercapai melalui program pemerintah (Zuhri, Delianoor, and Rahmatunnisa 2018). Oleh karena itu, dominasi anggota partainya yang masuk dalam lingkaran pemerintahan dapat membuat kebijakan Jokowi lebih pasti. Saran dari para anggota partai yang berada didekatnya dapat mempengaruhi kebijakan, sebab usulan kebijakan yang dibentuk merupakan formulasi kepentingan partai yang bertujuan demi menjaga elektabilitas dalam Pemilu berikutnya, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

3.1.3 Nahdlatul Ulama (NU) sebagai *Interest Influencer*

Interest influencer atau kelompok kepentingan merupakan tipe *policy influencers* yang ketiga menurut Coplin. Coplin mendefinisikan bahwa kelompok kepentingan terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama dan biasanya kepentingan bersifat ekonomis karena orang-orang sering kali dimotivasi untuk melakukan tindakan kolektif melalui persamaan kepentingan ekonomi. Namun kepentingan non-ekonomis juga dapat digunakan sebagai dasar tindakan kolektif mereka, terutama apabila terdapat ikatan etnis atau geografis. Kelompok kepentingan memiliki peran yang besar,

sebab banyak organisasi dan kelompok informal terkadang memiliki sumber finansial yang besar, serta mampu mempengaruhi para pemilih dan *partisan influencer*. Dalam memainkan pengaruhnya terhadap pengambil keputusan, kelompok kepentingan menggunakan beberapa cara untuk membentuk dukungan terhadap kepentingan mereka, seperti kampanye menulis surat hingga janji dukungan finansial atau ancaman menarik dukungan kepada pengambil keputusan (Coplin 1992, 87-88).

Hubungan aktor kelompok kepentingan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS, dapat dilihat melalui peran Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi islam dengan pengikut terbanyak di Indonesia. NU telah didirikan sejak tahun 1926 memiliki tujuan untuk menyebarkan Islam Nusantara serta menjunjung tinggi toleransi perbedaan agama, suku, ras, dan budaya melalui nilai-nilai inklusif *tawasuth* (moderasi), *tasamuh* (toleransi), *ta'awun* (gotong royong), *tawazun* (harmoni) dan lainnya (Murtaufiq 2019). Peran signifikan NU dalam memerangi fundamentalisme dan radikalisme agama diimplementasikan melalui semangat toleransi dan moderasi, sehingga kedudukan NU penting dalam memerangi isu tersebut dan sesuai dengan falsafah fundamental yang tercantum dalam Khittah NU 1926 (Mukhlis, Mustofa, and Syarifudin 2022).

Respons NU terhadap radikalisme dan terorisme turut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj bahwa pelaku radikalisme yang mengatasnamakan Islam merupakan kejahatan dan bentuk kedzaliman, serta dianggap lebih menakutkan dari kejahatan lainnya (Haris 2020). Langkah konkret NU dalam melawan terorisme dan radikalisme

secara tegas disampaikan melalui Mukhtamar ke-32 dan ke-33. Pada Mukhtamar ke-32 tahun 2010 tema yang diambil ditujukan atas keprihatinan terhadap ideologi radikal yang terjadi dan ditakutkan menurunkan ciri masyarakat Indonesia yang moderat, kemudian pada Mukhtamar ke-33 tahun 2015 tema yang diangkat mencakup komitmen NU terhadap penanggulangan paham radikal di masyarakat terutama melalui program kaderisasi yang intensif, termasuk upaya harmonisasi kehidupan beragama di tingkat global (Murtaufiq 2019).

Berbagai upaya terdiri dari pendekatan *soft power* melalui dakwah kultural, kampanye media sosial, hingga diplomasi antara aktor nasional maupun internasional, sedangkan *hard power* melalui Gerakan Pemuda Anshor dengan menjaga eksistensi NKRI (Haris 2020). Agenda serupa antara NU dengan pemerintah dapat dimaknai bahwa kelompok kepentingan memiliki relevansi dengan kebijakan pemerintah dalam melawan isu terorisme. Inisiatif yang dilakukan oleh kelompok kepentingan merupakan dukungan bagi pemerintah untuk memberantas isu terorisme bersama, baik di lingkup nasional maupun internasional melalui kerja sama antara negara. Peran aktif NU pada tahun 2018 tercantum dalam program PBNU yang terbukti efektif dalam memerangi radikalisme melalui penguatan prinsip *Ahlisunnah Waljamaah anNahdliyyah*; sosialisasi instruksi terstruktur dan sistematis dari pusat ke daerah; kegiatan pendidikan, kelembagaan dan kaderisasi; serta respons situasi melalui sikap, pengamatan, kritik dan saran (Mukhlis, Mustofa, and Syarifudin 2022).

Pada Pilpres 2014, Jokowi berhasil mengumpulkan sebagian besar ulama dan pengikut NU untuk menjadi pendukung utamanya dan menaruh perhatian besar terhadap organisasi tersebut (Arifianto 2021). Hadiah Jokowi terhadap NU

di awal pemerintahannya dibuktikan melalui Hari Santri dan dukungan *rebranding* ideologi Islam Nusantara NU pada tahun 2015. Hadirnya Jokowi pada pembukaan Muktamar NU ke-33 tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur dapat dilihat sebagai bentuk kedekatan Jokowi dengan NU (Rasyid 2015). Hubungan Harmonis Jokowi-NU semakin nyata ketika presiden mengeluarkan larangan hukum terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap sebagai kelompok garis keras Islam dan bertentangan dengan prinsip NU, serta merangkul NU sebagai sekutu utama umat Islam dalam pemerintahan (Arifianto 2021). Alhasil, berkat kedekatan Jokowi dengan NU terdapat empat Menteri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai afiliasi NU dalam kabinet pemerintahan 2014-2019.

Dalam konteks pengaruh terhadap pemerintah Indonesia, terdapat empat alasan mengapa NU menaruh pengaruh besar yang mampu menjadi aktor kolaboratif pemerintah (Mukhlis, Mustofa, and Syarifudin 2022). *Pertama*, NU merupakan organisasi islam terbesar di Indonesia dengan jumlah pengikut fantastis. Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), pada tahun 2013 menyebutkan bahwa sekitar 86,4 juta penduduk merupakan warga NU (Rasyid 2015). Hingga tahun 2021, berdasarkan *Survei Poltracking Indonesia* menyebutkan bahwa terdapat 41,9 % mengaku sebagai warga NU atau sekitar 80-90 juta dari data pemilih tetap sekitar 200 juta (Triono 2021). *Kedua*, dalam tradisi NU terdapat seorang panutan yang biasa di kenal dengan Kyai yang memiliki pengaruh terhadap pengikutnya dan berperan penting dalam menjaga kerukunan sosial yakni menyatukan umat tanpa timbulnya konflik. *Ketiga*, peran penting NU dalam bidang pendidikan melalui ribuan institusi mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan pesantren. *Keempat*, NU berperan penting

terhadap keberhasilan gerakan sosial moderasi Islam di Indonesia (Mukhlis, Mustofa, and Syarifudin 2022). (Mukhlis, Mustofa, and Syarifudin 2022).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kerja sama melawan terorisme dipengaruhi oleh NU. Coplin menyampaikan bahwa kelompok kepentingan berperan dalam proses perumusan politik luar negeri meskipun tidak mengarahkan secara jelas kebijakan luar negeri. *Interest influencer* tidak menentukan politik luar negeri, namun mereka mempengaruhi kompleksitas proses politik dalam negeri (Coplin 1992, 88). Hal ini sejalan dengan BNPT sebagai lembaga di bawah pemerintah yang melibatkan NU dalam berbagai program meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pembentukan kebijakan terhadap kontra-terorisme (Mukhlis, Mustofa, and Syarifudin 2022). Berbagai alasan di atas memperlihatkan bahwa NU memainkan peran yang besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pembentukan kebijakan.

Prinsip dan upaya serupa antara pemerintah NU, kedekatan antara Jokowi dan NU, hingga pengaruh besar NU terhadap pemerintahan dalam kontra-terorisme menjadi faktor terhadap presiden dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme. Dalam memainkan pengaruhnya terhadap pengambil keputusan, kelompok kepentingan menggunakan beberapa cara untuk membentuk dukungan terhadap kepentingan mereka, seperti kampanye menulis surat hingga janji dukungan finansial atau ancaman menarik dukungan kepada para pengambil keputusan (Coplin 1992, 87). Sejalan dengan posisi penting NU pada politik domestik, bobot politik strategis anggotanya dalam memberikan suara dapat menjadi sumber dukungan bagi presiden pada pemilu

selanjutnya atau sebaliknya, yakni ancaman menarik dukungan. Sehingga penting apabila para pengambil keputusan menjalin hubungan baik dengan kelompok kepentingan tersebut.

3.1.4 Opini Publik sebagai *Mass Influencer*

Mass influencer merupakan tipe *policy influencer* keempat dalam aktor politik domestik. Menurut Coplin, negara dengan sistem politik terbuka maka opini publik diperlukan oleh pengambil keputusan karena peran mereka dalam pemilu. Dalam perumusan kebijakan yang akan diambil, pengambil keputusan memperhitungkan dampaknya terhadap opini publik dan pemilu berikutnya. Opini publik belum memiliki kemampuan untuk memberikan arah yang jelas bagi pengambil keputusan karena keputusan luar negeri biasanya bersifat khusus dan kompleks, sehingga seolah-olah opini publik hanya sekedar suatu kekuatan yang mengarahkan pengambil keputusan. Para pengambil keputusan menggunakan opini publik untuk merasionalisasi tindakan-tindakan politik luar negerinya, meskipun opini publik tidak mengarahkan kebijakan luar negeri namun hal tersebut memainkan peran penting karena menciptakan alam perseptual bagi para pengambil keputusan (Coplin 1992, 89-91).

Dalam kaitannya dengan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme terlihat bahwa opini masyarakat memandang terorisme sebagai isu berbahaya dan wajib diberantas secara masif. Menurut *Indonesia Indicator (I2)*, selama tahun 2015 isu mengenai terorisme internasional menjadi isu penting dan paling sering dibahas di media massa sebanyak 1.230, terdiri dari media nasional dan internasional serta diberitakan sebanyak 104.061 kali atau sekitar 78,2 % dari enam topik berbeda dalam kategori kejahatan

internasional (Susanti 2015). Lebih lanjut, berdasarkan kajian –Presiden Jokowi dalam Potret Medial yang dirilis oleh I2, pemberitaan media nasional terkait isu Politik dan Keamanan mencapai 181.820 berita dengan pemberitaan terkait aksi terorisme menjadi isu terbesar kedua, yakni sebanyak 16.156 berita (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri 2018).

Berbagai kelompok arus utama umat Islam seperti NU, Muhammadiyah, hingga MUI sepakat untuk secara tegas dan jelas menolak radikalisme dan terorisme. Pernyataan publik terhadap isu terorisme berlandaskan pada dalil agama melalui ijtihad dan fatwa ulama bahwa agenda kelompok berbahaya dianggap bertentangan dengan prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika (Yunanto, Damayanti, and Novitasari 2017, 340). Begitu pula pandangan umat beragama minoritas lainnya pada tahun 2014 yang turut menyatakan penolakan atas jaringan kelompok terorisme (Kompas 2014). Berbagai kelompok umat beragama di Indonesia telah menyatakan bahwa kelompok terorisme merupakan perilaku penyimpang, baik secara agama maupun kenegaraan. Oleh karena itu, berbagai kelompok besar dapat dianggap sebagai aktor vital yang memberikan pengaruh penting terhadap opini publik dalam mendukung pemerintah, terutama pandangan masyarakat yang menjadi pengikut kelompok-kelompok tersebut.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA pada tahun 2015 di 33 provinsi menyatakan bahwa 84.62 % masyarakat Indonesia khawatir apabila aksi terorisme kembali terjadi di Indonesia, selain itu ditemukan bahwa 86.11% masyarakat khawatir apabila Indonesia dijadikan target selanjutnya jaringan kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) (Lindawaty 2016). Lebih lanjut, menurut survei *Saiful Mujani Research and Consulting* di seluruh provinsi

Indonesia pada tahun 2015 juga menyatakan bahwa 95,3% masyarakat menolak keberadaan kelompok terorisme yang menjadi ancaman bagi NKRI dan persentase tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya (Wardah 2016). Opini publik semakin diperkuat berdasarkan survei secara global yang dilakukan *Pew Research Center* di berbagai negara mayoritas Muslim pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa 65% penduduk Indonesia memandang ISIS sebagai ancaman utama global dan 79% tidak setuju dengan keberadaan kelompok tersebut, kemudian tanggapan ISIS sebagai ancaman utama global juga naik menjadi 74% pada tahun 2017 (Counter Extremism 2022).

Pada tahun 2018 LSI Denny JA kembali merilis survei yang menyatakan bahwa kekhawatiran publik terhadap aksi terorisme cukup tinggi, yakni sebesar 82% (Jelita 2018). Lebih dari 76% responden setuju terhadap masa penahanan yang lebih lama bagi tersangka teroris yang sesuai dengan UU terorisme tahun 2018, serta sekitar 70% mendukung peningkatan anggaran kepolisian dalam penanganan terorisme (The Jakarta Post 2018). Begitu pula survei ahli Tim Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyatakan bahwa potensi ancaman terorisme relatif tinggi, meskipun mayoritas ahli menyatakan kondisi pertahanan di Indonesia sudah cukup baik dan efektif dalam menghadapi ancaman, namun sebanyak 79% responden diantara 145 ahli menyatakan bahwa terorisme masih memiliki potensi tinggi sebagai ancaman di Indonesia (Pusat Penelitian Politik LIPI 2018).

Berdasarkan opini publik dari tahun ke tahun yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, kelompok agama, hingga para ahli menunjukkan bahwa mayoritas pandangan publik sepakat untuk menaruh perhatian penting terhadap

isu terorisme yang menjadi ancaman serius, sehingga mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya penanganan terhadap ancaman tersebut. Oleh karena itu dalam perumusan kebijakan yang akan diambil, para pengambil keputusan memperhitungkan dampaknya terhadap opini publik dan pemilu berikutnya (Coplin 1992, 89). Hal penting apabila pemerintah Indonesia sebagai pengambil keputusan perlu melakukan upaya peningkatan kerja sama kontra-terorisme dengan AS. Upaya pemerintah dalam membentuk kebijakan domestik terhadap penanganan terorisme dan keputusan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme terutama dengan negara *super power* seperti AS, menjadi bukti bahwa opini publik memainkan pengaruhnya terhadap pertimbangan proses pengambilan keputusan pemerintah Indonesia.

Upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama bilateral dengan AS sesuai dengan pragmatisme kebijakan luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Jokowi. Fokus pemerintah pada diplomasi bilateral ditujukan untuk meminimalisir waktu yang terbuang dalam melakukan hubungan diplomatik apabila tidak menguntungkan Indonesia (Widiatmaja and Albab 2019). Terlepas dari pragmatisme kebijakan luar negeri Indonesia, kerja sama kontra-terorisme tidak menjadi prioritas hubungan pemerintah Indonesia terhadap AS, sebab kerja sama yang dijalankan wajib memberikan manfaat nyata secara langsung terhadap Indonesia sehingga kebijakan luar negeri diimplementasikan dalam bentuk upaya melindungi WNI di luar negeri, promosi peluang ekonomi bagi perusahaan Indonesia, serta mendatangkan investasi asing (Murphy 2019). Selain itu, fokus pemerintah juga lebih berorientasi pada penguatan kebijakan

domestik atau *inward looking* yang cenderung mengacu terhadap sektor ekonomi dan infrastruktur (Widiatmaja and Albab 2019).

Pijakan pemerintah yang memutuskan untuk tetap meningkatkan kerja sama kontra-terorisme terlihat bahwa pengambil keputusan menggunakan opini publik untuk merasionalisasi tindakan-tindakan politik luar negerinya meskipun opini publik tidak mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia, namun hal itu memainkan peran penting karena menciptakan alam perseptual bagi para pengambil keputusan (Coplin 1992, 90-91). Terlihat bahwa pemerintah Indonesia meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS meskipun tidak menjadi prioritas hubungan kedua negara, namun opini publik memainkan pengaruh penting dalam memberikan gambaran bagi pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan luar negeri. Pembentukan kebijakan yang berlandaskan opini publik menjadi penting bagi pengambil keputusan sebagai bekal pada Pemilu berikutnya.

Tabel 3.1 Pengaruh Politik Domestik melalui Policy Influencer terhadap Kerja Sama Kontra-terorisme Indonesia-AS

<i>Policy Influencers</i>	Aplikasi Teori
<i>Bureaucratic</i>	Luhut seorang Jenderal TNI yang memiliki perjalanan panjang dalam kontra-terorisme. Kedekatan Jokowi dengan Luhut telah tercipta sebelum Jokowi menjadi Presiden hingga mendapat sebutan “Menteri segala urusan”. Karir Luhut di militer, pemerintahan, dan politik membuktikan bahwa ia memainkan pengaruh besar dan tepat sebagai penasihat terdekat Joko Widodo dalam konteks keamanan nasional. Jabatan strategis Kemenpolhukam menjadikan Luhut sebagai aktor birokratik utama terhadap keputusan dan kebijakan kerja sama kontra-terorisme.
<i>Partisan</i>	Partai PDIP memberikan konsistensi dukungan terhadap Jokowi sejak lama. Jokowi hanya seorang anggota partai yang bertugas menjalankan ideologi PDIP. PDIP memainkan pengaruh kuat dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Berbagai sosok PDIP memegang jabatan strategis menjadi bukti nyata pengaruh besar yang diberikan. Selain itu, PDIP juga mendukung upaya kontra-terorisme.
<i>Interest</i>	Nadlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jumlah pengikut sekitar 90 juta orang. Komitmen NU terhadap prinsip dan

	agenda yang toleran dan moderat serupa dengan tujuan pemerintah dalam melawan terorisme. Hubungan harmonis antara NU dengan Jokowi menjadi bukti pengaruh besar NU terhadap pemerintahan. Selain itu, terdapat empat faktor penting mengapa NU memiliki pengaruh besar sebagai aktor kolaboratif pemerintah dalam melawan terorisme.
<i>Mass</i>	Opini mayoritas masyarakat Indonesia secara jelas menentang terorisme. Berbagai elemen umat beragama menyatakan bahwa kelompok terorisme merupakan perilaku menyimpang baik secara agama maupun kenegaraan. Berdasarkan survey, mayoritas masyarakat Indonesia menunjukkan kekhawatiran, menolak, serta menganggap kelompok terorisme sebagai ancaman utama global. Selanjutnya, survey ahli Tim Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI juga menyatakan potensi ancaman terorisme masih tinggi di Indonesia. Meskipun mayoritas opini publik menentang terorisme, namun kerja sama kontra-terorisme tidak menjadi prioritas hubungan pemerintah Indonesia terhadap AS.

Dapat disimpulkan bahwa peran Luhut Binsar Panjaitan, PDIP, NU, dan Opini publik dalam kondisi politik domestik menjadi aspek vital pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS. Hubungan antara *policy influencers* dengan pemerintah dianggap sebagai rangkaian hubungan timbal balik yang sangat kompleks terhadap pembentukan kebijakan. Dalam memutuskan kebijakannya, pemerintah Indonesia membutuhkan *policy influencers*, sebab dukungan mereka memainkan peran signifikan untuk membuat posisi pemerintah lebih pasti dan bertindak sebagai referensi dalam merumuskan kebijakannya.

3.2 Kapabilitas Ekonomi dan Militer

Kapabilitas ekonomi dan militer suatu negara merupakan faktor penting bagi negara untuk menentukan arah kebijakan luar negerinya dan keduanya saling berkaitan. Menurut Coplin, tingkat kekuatan militer negara akan mempengaruhi kekuatan ekonominya, begitu juga sebaliknya tingkat kekuatan ekonomi negara akan mempengaruhi kekuatan militernya. Pengambilan keputusan politik luar negeri negara harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militernya sebagai

acuan dalam memainkan perannya di ranah internasional. Pengambil keputusan juga harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dalam memahami keterbatasan yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer (Coplin 1992, 110).

Coplin menambahkan bahwa kedua elemen akan mempengaruhi posisi tawar suatu negara di mata negara lain, serta mempengaruhi kemampuan negara untuk menekan negara lain. Kekuatan ekonomi dan militer dibutuhkan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional. Dengan demikian, faktor ekonomi dan militer akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara (Coplin 1992, 124). Semakin kuat ekonomi dan militer negara maka semakin mampu suatu negara untuk mempertimbangkan kepentingan nasional dengan tingkat kemampuannya.

Kekuatan ekonomi dan militer Indonesia-AS dapat ditinjau berdasarkan hubungan antara negara maju dan negara terbelakang. Hegemoni AS yang telah lama tercipta cenderung berbeda dengan Indonesia, baik ekonomi maupun militernya. Hubungan Indonesia dengan AS dapat memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia. Menurut Coplin, negara maju dapat memberikan keuntungan strategis bagi negara terbelakang karena mobilitas yang dimiliki negara maju. Negara maju mampu menekan negara kurang maju melalui berbagai cara seperti ancaman menghentikan suplai senjata, mencari pasaran lain untuk mendapatkan kebutuhannya, menolak perjanjian investasi, serta melakukan boikot atau blokade secara langsung. Namun di sisi lain, mereka mampu membantu negara terbelakang melalui berbagai cara seperti pemberian berbagai senjata vital,

modal dan produk manufaktur, hingga bantuan secara teknik sektor militer dan stabilitas politik domestik (Coplin 1992, 134).

3.2.1 Kapabilitas Ekonomi Indonesia

Menurut Coplin, kemampuan ekonomi suatu negara dapat menggambarkan secara umum tingkat kemakmurannya. Dalam mengukur kemampuan ekonomi dapat dilihat melalui indikator *Gross National Product* (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai acuan kekayaan negara dengan negara lain, namun lebih berguna apabila dilihat melalui GNP per kapita yang lebih spesifik menunjukkan tingkat perekonomian masyarakat (Coplin 1992, 115).

Kebijakan pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS dapat diidentifikasi melalui kemampuan ekonomi Indonesia. Indikator kekuatan ekonomi Indonesia dapat dilihat melalui data dan klasifikasi World Bank yang dikeluarkan setiap tahun berdasarkan perkiraan GNP atau PNB per kapita (US\$) suatu negara pada tahun sebelumnya. Klasifikasi dibagi menjadi empat kategori yakni, *Low Income* (pendapatan rendah), *Lower Middle Income* (pendapatan menengah ke bawah), *Upper Middle Income* (pendapatan menengah ke atas, dan *High Income* (pendapatan tinggi).

Tabel 1.2 Klasifikasi Negara World Bank berdasarkan GNP per kapita

Tahun	Kategori Pendapatan Negara (US\$)			
	Lower Income	Lower Middle Income	Upper Middle Income	High Income
2016	< 1.025	1.026 – 4.035	4.036 – 12.475	> 12.476
2017	< 1.005	1.006 – 3.955	3.956 – 12.235	> 12.236
2018	< 995	996 – 3.895	3.896 – 12.055	> 12.056
2019	< 1.025	1.026 – 3.995	3.996 – 12.375	> 12.376
2020	< 1.035	1.036 – 4.045	4.046 – 12.535	> 12.536

Sumber: World Bank Data Team (2016-2020).

Tabel 3.3 Data Perbandingan Indikator Ekonomi Indonesia-AS

Negara	Indikator (US\$)	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indonesia	GNP/PNB	860.95 Miliar	832.3 Miliar	902.05 Miliar	983.44 Miliar	1.01 Triliun	1.09 Triliun
	GNP/PNB /kapita	3,620	3,430	3,400	3,530	3.840	4.050
Amerika Serikat	GNP/PNB	18.04 Triliun	18.66 Triliun	19.02 Triliun	19.89 Triliun	20.95 Triliun	21.71 Triliun
	GNP/PNB /kapita	55,800	56,620	57,140	59,250	63,490	65,970

Sumber: World Bank Data (2022).

Berdasarkan klasifikasi World Bank, Indonesia antara tahun 2014-2018 berada pada posisi pendapatan menengah ke bawah, dan hanya termasuk pendapatan menengah ke atas pada tahun 2019. Sebaliknya, AS selalu termasuk negara dengan pendapatan tinggi sejak 2014-2019 dan PNB AS sebagai negara adidaya berbanding jauh dengan Indonesia. Selain itu, AS juga menaruh kontribusi besar dalam hal investasi ke Indonesia. *Foreign Direct Investment* (FDI) atau investasi asing langsung yang diberikan AS terhadap Indonesia antara tahun 2013 hingga 2017 mencapai \$36 Miliar dan menjadikan AS sebagai sumber FDI terbesar bagi Indonesia dalam kurun waktu tersebut (Ernst & Young Indonesia 2019). FDI yang diberikan oleh AS terlihat penting, sebab dapat memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia melalui berbagai cara yang akan berdampak pada nilai tambah (*Added value*), yakni berdasarkan tiga mekanisme utama. *Pertama*, melalui modal, teknologi, manajemen, dan sumber daya lain yang dibawa oleh perusahaan asing dan berkontribusi terhadap produksi dan nilai tambah. *Kedua*, melalui jenis barang dan jasa yang dapat diproduksi di

Indonesia. *Ketiga*, melalui perusahaan domestik seperti dukungan terhadap industri lokal (Sjöholm 2017).

Berdasarkan kekuatan ekonomi Indonesia yang masih jauh berada di bawah AS dan kontribusi besar AS terhadap investasinya ke Indonesia, maka dalam menentukan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia cenderung tidak memiliki kapabilitas untuk menekan AS. Oleh karena itu, alasan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan perannya di panggung politik internasional. Tidak terdapat penekanan secara langsung yang dilakukan oleh AS, namun kemampuan Indonesia berdasarkan PNB maupun PNB per kapita, serta FDI yang diberikan AS dapat menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia bahwa hal tersebut memengaruhi dalam proses perumusan pengambilan keputusan.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk meningkatkan kerja sama dengan AS menjadi poin keuntungan strategis dalam segi kekuatan ekonomi dalam kegiatan politik luar negerinya. Apabila Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi, maka dapat meningkatkan kekuatan militernya. Sehingga penting, Indonesia menjalin hubungan baik dan kedekatan dengan AS demi mencapai kepentingan nasionalnya, sebab pengambil keputusan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dalam memahami keterbatasan yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer (Coplin 1992, 110).

3.2.2 Kapabilitas Militer Indonesia

Coplin secara umum menggambarkan tingkat kekuatan militer negara berdasarkan tiga kriteria yakni jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan kelengkapan

militer. Negara maju mampu memperoleh perlengkapan militer yang canggih, pasukan yang terampil dan terlatih dalam mengoperasikan berbagai perlengkapan militernya, namun negara terbelakang masih memiliki kemampuan untuk mendapatkan perlengkapan militer yang canggih dari negara maju, meskipun pasukannya tidak cukup terampil dan terlatih dalam mengoperasikan perlengkapan militernya (Coplin 1992, 124).

Meskipun Indonesia tidak memiliki kekuatan ekonomi yang hebat secara global, namun tingkat kekuatan militer Indonesia tak dapat diragukan. Berdasarkan data *Global Fire Power* (GFP), peringkat kekuatan militer Indonesia antara tahun 2014-2019 secara konsisten selalu berada pada 20 posisi teratas dunia, bahkan sempat menempati urutan ke-12 pada tahun 2015 (Global Fire Power 2021). Anggaran militer Indonesia juga meningkat dari tahun 2014 hingga 2019. Menurut data *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), pengeluaran militer pada tahun 2014 sebesar \$6.93 Miliar dan naik menjadi \$9.3 Miliar pada tahun 2019 (World Bank Data 2022).

Total pasukan militer pada tahun 2019 berjumlah sekitar 800.000 pasukan, terbagi menjadi 400.000 pasukan aktif dan 400.000 pasukan cadangan. Kekuatan sektor pertahanan darat meliputi 1.577 total unit persenjataan, 315 unit tank, hingga senjata anti-tank 11.000 unit dan anti-pesawat 100 unit. Pada kekuatan pertahanan laut meliputi 221 total kapal angkatan laut yang terdiri dari kapal fregat, korvet, hingga kapal selam. Selanjutnya, pada kekuatan udara meliputi 451 total pesawat yang terdiri dari helikopter, pesawat tempur, hingga pesawat multifungsi (Shiddiqy and Sudirman 2019).

Berdasarkan kekuatan militer, kapabilitas militer Indonesia di mata dunia dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS. Menurut Coplin, tingkat kekuatan militer suatu negara akan mempengaruhi kekuatan ekonominya, begitu juga sebaliknya bahwa tingkat kekuatan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi kekuatan militernya. Kekuatan ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan melalui tingkat kekuatan militernya, meskipun tidak saat ini atau mungkin pada masa yang akan datang.

Menurut Coplin, faktor ekonomi dan militer akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara (Coplin 1992, 124). Oleh karena itu, sikap AS untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan Indonesia dapat dipahami bahwa kekuatan militer Indonesia menentukan sikap negara lain demi mencapai kepentingan bersama, khususnya dalam hal kontra-terorisme. Dalam isu terorisme, mobilitas AS sebagai negara militer terkuat di dunia mampu memberikan keuntungan strategis Indonesia baik dari segi pelatihan pasukan maupun perlengkapan militer.

Tabel 3.4 Pengaruh Kapabilitas Ekonomi dan Militer terhadap Kerja Sama Kontra-terorisme Indonesia-AS

Kapabilitas Ekonomi dan Militer	Pengaruh terhadap Hubungan Indonesia-AS
Ekonomi	Kapabilitas ekonomi Indonesia dapat dilihat melalui empat klasifikasi World Bank berdasarkan GNP per kapita. Pada tahun 2014-2018 Indonesia berada pada posisi negara pendapatan menengah ke bawah, berbeda dengan AS yang selalu berada dalam negara dengan pendapatan tinggi. FDI yang diberikan AS ke Indonesia tahun 2013-2017 memainkan pengaruh besar terhadap nilai tambah perekonomian Indonesia. Indonesia tidak mampu menekan AS dalam kebijakan luar negeri, sehingga kerja sama dengan AS menjadi penting sebagai keuntungan strategis demi mencapai kepentingan nasional.
Militer	Kapabilitas militer Indonesia terlihat hebat di mata dunia. Berdasarkan data GFP, peringkat kekuatan militer Indonesia antara tahun 2014-2019 secara konsisten berada pada 20 posisi teratas di dunia, begitu pula dengan anggaran militer yang meningkat hingga \$9.3 Miliar pada tahun 2019.

	Tingkat kekuatan militer Indonesia dapat menjadi acuan penting terhadap kerja sama dengan AS sebagai kekuatan militer terbaik di dunia. Kemauan AS untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia dapat dilihat bahwa kekuatan militer Indonesia cukup berpengaruh terhadap sikap negara lain dalam mencapai kepentingan bersama. Mobilitas AS sebagai negara dengan militer terkuat dapat memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia.
--	--

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia. Hubungan antara negara terbelakang dan negara maju dapat memberikan keuntungan strategis bagi negara terbelakang karena mobilitas yang dimiliki negara maju (Coplin 1992, 134). Tekanan yang diberikan AS sebagai negara maju dibuktikan atas embargo militer yang sempat dialami Indonesia.

Negara maju mampu untuk menekan negara yang kurang maju melalui berbagai cara seperti ancaman menghentikan suplai senjata, mencari pasaran lain untuk mendapatkan kebutuhannya, menolak perjanjian investasi, serta melakukan boikot atau blokade secara langsung. Penting apabila Indonesia meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS untuk mendapatkan bantuan militer maupun ekonomi, negara maju mampu untuk membantu negara kurang maju melalui berbagai cara seperti pemberian berbagai senjata vital, modal maupun produk manufaktur, hingga bantuan secara teknik sektor militer dan stabilitas politik domestik (Coplin 1992, 134).

3.3 Konteks Internasional

Menurut Coplin dalam konteks internasional untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri suatu negara dapat dilihat berdasarkan tiga kondisi yakni geografis, politik, dan ekonomi. Kondisi

geografis tiap negara berkaitan antara satu dengan yang lain dalam pola hubungan internasional. Lingkungan internasional suatu negara terdiri atas lokasi yang didudukinya dan berkaitan dengan negara lain, serta terjadinya hubungan ekonomi dan politik antara suatu negara dengan negara lain, sehingga kondisi geografis memiliki peran dalam sistem politik internasional. Kedekatan geografis dapat mempengaruhi posisi suatu negara pada politik internasional seperti hubungan perdagangan keduanya, perilaku pemberian suara di PBB hingga keanggotaan bersama dalam suatu organisasi. Hubungan-hubungan ekonomi antara negara dapat dilihat berdasarkan arus dagang suatu negara yang menciptakan ketergantungan bagi negara lain. Ketergantungan ekonomi yang tercipta pada suatu negara akan menimbulkan dukungan maupun tuntutan kepada para pengambil keputusan. Pada konteks hubungan politik, aliansi dapat berdampak besar bagi anggotanya atau bukan, sehingga hubungan politik atas kepentingan bersama menjadi bagian penting dalam konteks internasional (Coplin 1992, 167-168).

Terlepas AS yang tidak memiliki hubungan geografis dengan Indonesia secara langsung, namun keduanya memainkan peran yang sama di Asia Tenggara. Pandangan yang sama antara Indonesia-AS dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara semakin memperkuat posisi pemerintah Indonesia dan mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS. Oleh karena itu, konteks internasional dapat dilihat melalui peran Indonesia-AS di Asia Tenggara, khususnya dalam melihat ancaman terorisme di Asia Tenggara, serta hubungan ekonomi dan politik dengan ASEAN.

3.3.1 Hubungan Indonesia, AS, dan ASEAN terhadap Ancaman Geografis Asia Tenggara

Asia Tenggara telah lama terkenal sebagai sarang berbagai kelompok teroris seperti Jemaah Islamiyah (JI) dan Al-Qaeda, serta potensi baru kelompok ISIS yang telah menyatakan keberadaannya di Asia Tenggara untuk memobilisasi serangan di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina (Amin 2017). Kondisi geografis perbatasan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dianggap menjadi suatu lingkungan kondusif bagi jaringan teroris seperti JI dan berbagai kelompok lainnya dalam melancarkan serangan (Sumpter and Franco 2018). Permintaan kelompok ISIS terhadap simpatisannya untuk melakukan perjalanan ke Mindanao, Filipina Selatan, semakin mempermudah para teroris di Indonesia untuk berkumpul di sana dan melakukan penyerangan kembali di wilayah Indonesia (Kurlantzick 2018). Oleh karena itu, Indonesia, Malaysia, dan Filipina disebut sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi tinggi dan mendorong kemunculan kelompok teroris jihadis global (United Nations Office on Drugs and Crime 2021, 6).

Secara geografis, Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Australia serta dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Pasifik Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia dan memiliki sekitar 17.500 pulau termasuk pulau-pulau kecil dan besar dengan luas wilayah laut 3,25 juta km² atau sekitar dua per tiga dari luas wilayah secara keseluruhan (Pratama 2020). Di bagian Utara, Indonesia berbatasan dengan daratan Malaysia dan berbatasan dengan kawasan laut Filipina. Di sisi lain, AS merupakan negara adidaya yang terletak di antara Samudra Atlantik hingga

Samudra Pasifik dan termasuk dalam kawasan Amerika Utara. Terlepas dari Indonesia-AS yang tidak memiliki hubungan geografis secara langsung, namun keduanya sering kali memiliki pandangan yang sama dalam mengatasi ancaman di Asia Tenggara, sehingga mendorong terjadinya kerja sama antara pemerintah Indonesia dan AS.

Adanya kelompok muslim yang termarginalisasikan di beberapa negara Asia Tenggara, diantaranya seperti Moro dan Mindanao di Filipina, serta Pattani di Thailand, memberikan kesempatan bagi berbagai kelompok teroris jihadis untuk melakukan perekrutan anggota *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL) atau ISIS. Pada tahun 2014-2019, sekitar 115 serangan terkait ISIL terjadi di seluruh Indonesia, Malaysia dan Filipina (United Nations Office on Drugs and Crime 2021, 6-7).

Dalam menangani ancaman terorisme kawasan, Indonesia dan negara-negara kawasan semakin menaruh perhatian untuk melakukan kerja sama dalam melawan kelompok ISIS. Pada tahun 2017, melalui pertemuan *ASEAN Defense Minister Meeting* (ADMM) ke-11, para menteri pertahanan sepakat bahwa ancaman ISIS merupakan perhatian utama dan mendorong terciptanya peningkatan kerja sama dalam mengatasi ancaman tersebut. Pada tahun berikutnya, negara-negara anggota juga sepakat untuk melakukan kerja sama praktis dalam melindungi ASEAN dari ancaman terorisme yang semakin meningkat di kawasan (Amin 2017).

Dalam melihat ancaman terorisme di Asia Tenggara, AS juga menaruh kewaspadaan terhadap kelompok militan Islam. Fokus AS mengacu pada perkembangan kelompok teroris afiliasi ISIS di kawasan Asia Tenggara.

Pemerintah AS waspada akan potensi jaringan ISIS yang dapat memiliki kekuasaan teritorial dan meningkatkan intensitas kegiatannya, sehingga pemerintahan Trump berupaya untuk meningkatkan intensitas kerja sama dengan para pemimpin Asia Tenggara dalam mengatasi ancaman terorisme seperti Presiden Filipina Duterte, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha (Kurlantzick 2018). Tak hanya melalui hubungan bilateral, pada tahun 2017 AS menaruh keterlibatan melalui forum *ASEAN Defense Minister Meeting Plus* (ADMM+) sebagai mitra kerja negara-negara ASEAN dalam menangani ancaman terorisme kawasan (Amin 2017).

3.3.2 Hubungan Ekonomi Indonesia, AS, dan ASEAN

Secara ekonomi, hubungan bilateral Indonesia-AS secara spesifik telah terjalin sejak tahun 1998 melalui kesepakatan *Trade and Investment Framework Agreement* (TIFA) sebagai forum pembahasan berbagai isu perdagangan dan investasi. Hubungan baik ekonomi keduanya menghasilkan total perdagangan hingga \$27,7 Miliar pada tahun 2014 (Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia 2018). Selain itu, *Foreign Direct Investment* (FDI) atau investasi asing langsung yang diberikan AS terhadap Indonesia antara tahun 2013 hingga 2017 mencapai \$36 Miliar dan menjadikan AS sebagai sumber FDI terbesar bagi Indonesia dalam kurun waktu tersebut (Ernst & Young Indonesia 2019).

Pada konteks ekonomi regional, Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan negara di sekitarnya. Implementasi kerja sama Indonesia dengan negara kawasan Asia Tenggara terjalin berdasarkan salah satu pilar ASEAN melalui *ASEAN Economic Community* (AEC) yang sebelumnya dikenal sebagai *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang telah terbentuk sejak tahun 1992. AEC

merupakan realisasi integrasi ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara demi terwujudnya ASEAN sebagai pasar tunggal dan dasar produk, kawasan kompetitif, pembangunan ekonomi merata, serta terintegrasi dalam sistem ekonomi global dan lebih jauh berdampak pada kawasan yang kompetitif terhadap arus barang, jasa, kebebasan investasi, kebebasan arus modal, pemerataan pembangunan ekonomi hingga pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi (ASEAN Secretariat 2020c).

Begitu juga AS yang memiliki hubungan baik dengan ASEAN dan cukup berpengaruh pada perekonomian kawasan Asia Tenggara. Kerja sama ekonomi ASEAN-AS telah dimulai sejak 1977 dan terus meningkat hingga terciptanya kesepakatan *Trade and Investment Framework Arrangement* (TIFA) pada tahun 2006 dan inisiatif *Expanded Economic Engagement* (E3) pada tahun 2012. Pada tahun 2018 perdagangan keduanya dalam sektor barang dan jasa mencapai \$334 Miliar, serta investasi AS di ASEAN sebesar \$271 Miliar (U.S Embassy and Consulates in Indonesia 2019). Hingga tahun 2019 AS merupakan mitra dagang terbesar kedua ASEAN dengan total perdagangan dua arah sebesar \$296,4 Miliar dan sumber FDI terbesar ASEAN dengan total \$24,5 Miliar (ASEAN Secretariat 2020b).

Berdasarkan nilai perdagangan antara Indonesia-AS maupun dengan ASEAN, AS memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia maupun stabilitas ekonomi Asia Tenggara. Menurut Coplin, Hubungan-hubungan ekonomi antara negara dapat dilihat berdasarkan arus dagang suatu negara yang menciptakan ketergantungan bagi negara lain. Ketergantungan ekonomi yang tercipta pada suatu negara akan menimbulkan dukungan maupun

tuntutan kepada para pengambil keputusan (Coplin 1992, 167). Hubungan ekonomi yang baik antara Indonesia, AS dan ASEAN serta nilai perdagangan yang cukup tinggi semakin mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap menjalin hubungan kerja sama dengan AS sebagai salah satu mitra strategis.

3.3.3 Hubungan Politik Indonesia, AS, dan ASEAN

Secara politik, hubungan diplomatik Indonesia-AS telah dimulai sejak tahun 1949. AS merupakan salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia pasca kemerdekaan. Peran AS terhadap Indonesia dalam proses demokratisasi dan reformasi tahun 1998 semakin memperkuat hubungan politik kedua negara hingga tercipta kemitraan komprehensif pada tahun 2010 yang ditujukan untuk mendorong kerja sama konsisten terkait demokrasi dan masyarakat sipil, pendidikan, keamanan, ketahanan dan mitigasi, maritime, energy, hingga perdagangan. Pada tahun 2015, hubungan keduanya ditingkatkan menjadi *US-Indonesia Strategic Partnership* untuk memperluas kerja sama dalam menangani berbagai isu penting bilateral, regional hingga global (U.S. Department of State 2022). Begitu pula keharmonisan hubungan kerja sama Indonesia-AS dalam mengatasi ancaman terorisme yang telah terjalin sejak masa pemerintahan Megawati dan berlanjut secara signifikan hingga masa pemerintahan SBY, sehingga menjadi poin penting bagi pemerintahan selanjutnya bahwa AS merupakan mitra akrab bagi Indonesia untuk melakukan upaya kontra-terorisme.

Hubungan harmonis tak hanya dijalin kedua negara saja, melainkan terdapat upaya untuk melakukan hubungan dengan ASEAN. Secara politik, hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara

diimplementasikan melalui *ASEAN Political-Security Community* (APSC). APSC merupakan salah satu pilar kerja sama kawasan yang ditujukan untuk memastikan kehidupan damai antar negara anggota maupun dengan tatanan dunia dalam lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis. Selain itu, APSC menekankan penyelesaian proses damai dalam mengatasi perbedaan dalam kawasan dan pandangan serupa terhadap isu keamanan bersama berdasarkan keterkaitan geografis, visi dan tujuan bersama antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, APSC memiliki sasaran penting terhadap kerja sama dalam pembangunan politik; pembentukan norma bersama; pencegahan dan resolusi konflik maupun pembangunan perdamaian pasca-konflik; hingga mekanisme pelaksanaan (ASEAN Secretariat 2020).

Begitu pula hubungan politik antara AS dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN. Hubungan AS dengan ASEAN sebagai mitra dialog telah terjalin sejak tahun 1977. Hingga saat ini, kemitraan antara keduanya telah berkembang secara signifikan dan menjadi bagian penting bagi keamanan dan stabilitas regional. Hubungan harmonis meningkat secara signifikan sejak tahun 1990-an dalam memperkuat kerja sama pembangunan, stabilitas Asia Tenggara hingga kontribusi AS terhadap perdamaian dan kemakmuran kawasan (Hang 2018). Selain itu, kontribusi AS terhadap Asia Tenggara diimplementasikan dalam berbagai program hubungan perdagangan, bantuan pengembangan hingga kerja sama keamanan.

Berdasarkan hubungan politik yang terjalin dengan baik antara Indonesia-AS maupun dengan ASEAN, AS memiliki pengaruh terhadap politik Indonesia maupun stabilitas politik Asia Tenggara. Menurut Coplin, pada hubungan politik,

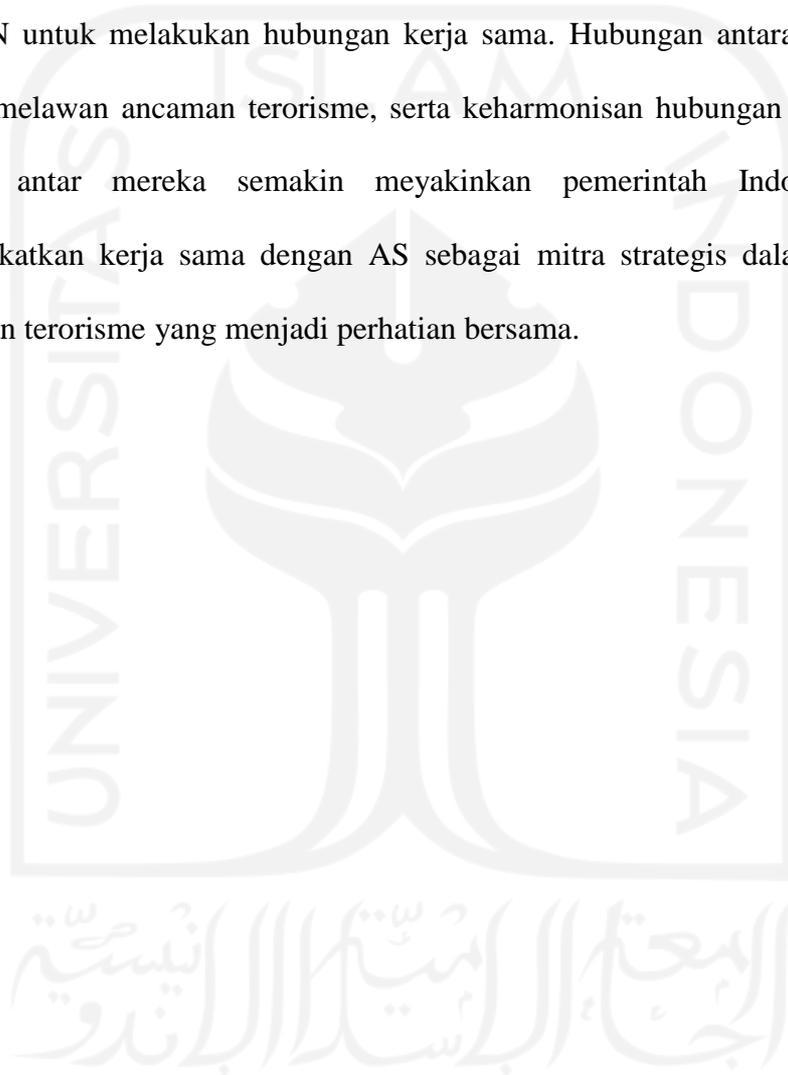
aliansi dapat berdampak besar bagi anggotanya atau bukan, sehingga hubungan politik atas kepentingan bersama menjadi bagian penting dalam konteks internasional (Coplin 1992, 167). Hubungan politik yang baik antara Indonesia, AS dan ASEAN sejak lama semakin memperkuat posisi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan AS dalam mencapai kepentingan bersama.

Tabel 3.5 Pengaruh Konteks Internasional terhadap Kerja Sama Kontra-terorisme Indonesia-AS

Konteks Internasional	Pengaruh terhadap Hubungan Indonesia-AS
Geografis	Secara geografis, Indonesia dan AS tidak memiliki keterkaitan secara langsung, namun dapat dilihat berdasarkan pola hubungan keduanya dalam memberantas ancaman terorisme di Asia Tenggara. Indonesia dan ASEAN sepakat bahwa ancaman terorisme merupakan perhatian utama di kawasan. Melalui ADMM para Menteri sepakat untuk mendorong peningkatan kerja sama praktis. Begitu pula AS yang berupaya meningkatkan intensitas kerja sama dengan para pemimpin Asia Tenggara secara bilateral, maupun keterlibatan secara multilateral melalui forum ADMM+.
Ekonomi	Secara ekonomi, hubungan Indonesia-AS secara spesifik telah terjalin sejak 1998 melalui TIFA. Pada tahun 2014, total perdagangan kedua negara mencapai \$27,7 Miliar. AS menjadi sumber utama investasi asing langsung dan menaruh kontribusi besar terhadap Indonesia melalui FDI antara tahun 2013-2017 senilai \$36 Miliar. Hubungan ekonomi Indonesia-ASEAN terimplementasi melalui AEC sebagai kerja sama integrasi ekonomi kawasan. Begitu pula hubungan ekonomi AS-ASEAN yang telah dimulai sejak 1977 hingga terbentuk kesepakatan TIFA dan E3. Pada tahun 2018, total perdagangan AS-ASEAN dalam sektor barang dan jasa mencapai \$334 Miliar dan investasi senilai \$271 Miliar. Pada tahun 2019 AS merupakan mitra dagang terbesar kedua ASEAN dengan total perdagangan \$296,4 Miliar dan sumber FDI terbesar senilai \$24,5 Miliar.
Politik	Secara politik, hubungan Indonesia-AS telah dimulai sejak 1949. Kontribusi besar politik AS terhadap Indonesia terlihat sejak demokratisasi tahun 1998 hingga tercipta kemitraan komprehensif dan kesepakatan <i>US-Indonesia Strategic Partnership</i> . Hubungan politik Indonesia-ASEAN terimplementasi melalui APSC sebagai kerja sama integrasi politik kawasan. Begitu pula hubungan politik AS-ASEAN yang telah dimulai sejak tahun 1977 sebagai mitra dialog. Kontribusi besar AS meningkat secara signifikan sejak tahun 1990-an terhadap keamanan dan stabilitas Asia Tenggara hingga terciptanya berbagai hubungan perdagangan, bantuan pengembangan hingga kerja sama keamanan.

Berdasarkan konteks internasional, dapat ditemukan bahwa faktor-faktor eksternal mampu mempengaruhi dan mendorong pemerintah Indonesia untuk

meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS. Kondisi Geografis Indonesia di Asia Tenggara mendorong terjadinya hubungan politik dan ekonomi melalui ASEAN, begitu pula keharmonisan hubungan AS dengan ASEAN demi mencapai kepentingan bersama. Ancaman terorisme di Asia Tenggara, kepentingan politik dan ekonomi menciptakan dorongan bagi Indonesia, AS, dan ASEAN untuk melakukan hubungan kerja sama. Hubungan antara ketiga aktor dalam melawan ancaman terorisme, serta keharmonisan hubungan ekonomi dan politik antar mereka semakin meyakinkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan AS sebagai mitra strategis dalam mengatasi ancaman terorisme yang menjadi perhatian bersama.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pandangan yang serupa antara Indonesia-AS dalam kebijakan maupun kerja sama kedua negara dalam mengatasi ancaman terorisme sejak insiden 9/11 dan Bom Bali terlihat semakin harmonis. Perjalanan panjang kedua negara menjadi poin penting bagi pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS pada tahun 2015-2019. Kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor yakni politik domestik, kapabilitas militer dan ekonomi, serta konteks internasional.

Faktor politik domestik dipengaruhi oleh *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer*. Pengaruh birokratik diperankan oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pensiunan Jenderal TNI yang memiliki kepiawaian kontra-terorisme dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Joko Widodo sebagai pengambil keputusan. Pengaruh partai diperankan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai yang menaruh konsistensi dukungan terhadap Jokowi, pengaruh besar terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta mendukung upaya kontra-terorisme. Pengaruh kelompok kepentingan diperankan oleh Nahdlatul Ulama sebagai organisasi islam terbesar yang memiliki kepentingan sama dengan pemerintah untuk memberantas terorisme dan memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Opini publik diperankan oleh berbagai elemen masyarakat yang menyatakan kekhawatiran, menolak, serta menganggap ancaman terorisme sebagai ancaman serius yang

memiliki potensi tinggi di Indonesia, meskipun kerja sama kontra-terorisme tidak menjadi prioritas hubungan kerja sama Indonesia-AS.

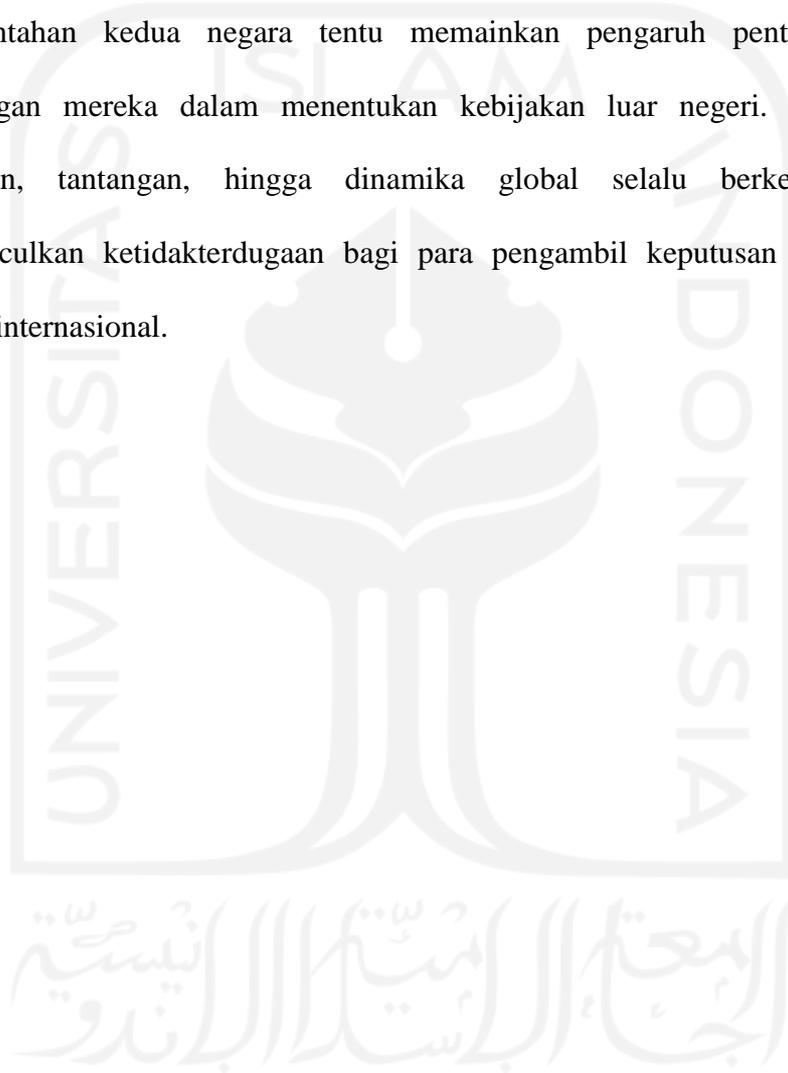
Faktor kapabilitas ekonomi dan militer dapat dilihat melalui tingkat kekuatan ekonomi dan militer Indonesia. Pengaruh kapabilitas ekonomi dapat dilihat melalui tingkat kekuatan ekonomi Indonesia yang menjadi pertimbangan pemerintah bahwa kekuatan ekonominya berbeda jauh dengan AS, sehingga penting apabila Indonesia meningkatkan kerja sama dengan AS. Pengaruh kapabilitas militer dapat dilihat melalui tingkat kekuatan militer Indonesia yang secara konsisten berada pada 20 posisi teratas di dunia, sehingga dapat menjadi acuan terhadap kerja sama dengan AS sebagai kekuatan militer terbaik di dunia demi tercapainya kepentingan bersama.

Faktor konteks internasional dapat dilihat melalui kepentingan Indonesia, AS dan ASEAN yang serupa dalam mengatasi ancaman terorisme di Asia Tenggara. Hubungan baik dalam sektor politik dan ekonomi antar mereka, serta pengaruh besar AS dalam konteks geografis, politik, dan ekonomi mempengaruhi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dengan AS sebagai mitra strategis dalam mencapai kepentingannya.

4.2 Rekomendasi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis barangkali masih terdapat keterbatasan atau celah yang dapat disempurnakan oleh peneliti lainnya. Penelitian ini secara spesifik mengacu pada faktor politik domestik, kapabilitas ekonomi dan militer, serta konteks internasional yang mempengaruhi kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk meningkatkan kerja

sama kontra-terorisme dengan AS. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya dalam menilai hubungan kerja sama kontra-terorisme Indonesia-AS dapat dilihat melalui pola hubungan pemerintah kedua negara pasca tahun 2019, apakah kedua negara tetap melakukan hubungan harmonis kerja sama kontra-terorisme yang telah lama terciptanya atau justru sebaliknya. Perubahan aktor dalam pemerintahan kedua negara tentu memainkan pengaruh penting terhadap pandangan mereka dalam menentukan kebijakan luar negeri. Kompleksitas ancaman, tantangan, hingga dinamika global selalu berkembang dan memunculkan ketidakterdugaan bagi para pengambil keputusan di panggung politik internasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Khoirul. 2017. -ISIS Menuju Asia Tenggara: Ancaman dan Kerja Sama Keamanan Kawasan dalam Menghadapi Peningkatan Ekspansi ISIS. *Jurnal Hubungan Internasional* 6 (2). <https://doi.org/10.18196/hi.62117>.
- Arifianto, Alexander R. 2021. -From Ideological to Political Sectarianism: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and the State in Indonesia. *Religion, State and Society* 49 (2): 126–41. <https://doi.org/10.1080/09637494.2021.1902247>.
- ASEAN Secretariat. 2020a. -ASEAN Political Security Community. *ASEAN Main Portal*. 2020. <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/>.
- . 2020b. -ASEAN-US Economic Relation. *ASEAN Main Portal*. 2020. <https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy/asean-us-economic-relation/>.
- . 2020c. -Economic Community. *Economic Community*. 2020. <https://asean.org/our-communities/economic-community-2/>.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. 2018. -Riset: Kebijakan Politik dan Keamanan Banyak Disorot Media – Badan Litbang. *Oktober 2018*. <http://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-kebijakan-politik-dan-keamanan-banyak-disorot-media/>.
- Biegon, Rubrick, dan Tom F. A. Watts. 2020. -When Ends Trump Means: Continuity versus Change in US Counterterrorism Policy. *Global Affairs* 6 (1): 37–53. <https://doi.org/10.1080/23340460.2020.1734956>.
- BNPT. 2019a. -Tugas Pokok dan Fungsi - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *BNPT*. 2019. <https://www.bnpt.go.id/tupoksi>.
- . 2019b. -Pemerintah dan DPR Sepakat Percepat Penyelesaian Revisi UU Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *BNPT*. 10 Juli 2019. <https://bnpt.go.id/pemerintah-dan-dpr-sepakat-percepat-penyelesaian-revisi-uu-penanggulangan-tindak-pidana-terorisme>.
- . 2021. *MODUL PENGETAHUAN DASAR KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENANGGULANGAN TERORISME*. 1 ed. Bogor: BNPT.
- Choir, Miftachul. 2021. -UNIT-LEVEL EXPLANATION ON INDONESIAN FOREIGN POLICY: ELITE CONSENSUS AND SINK THE VESSEL POLICY UNDER THE JOKOWI'S PRESIDENCY. *01 (02)*: 36.
- Connelly, Aaron L. 2014. -Indonesian Foreign Policy under President Jokowi. *Lowy Institute for International Policy*, 1–18.
- Coplin, William D. 1992. *Pengantar politik internasional: Suatu telaah teoritis / William D. Coplin*. 2 ed. Bandung: Sinar Baru.
- Counter Extremism. 2022. -Indonesia: Extremism and Terrorism. *Counter Extremism Project Indonesia: Extremism and Terrorism*. 2022. <https://www.counterextremism.com/countries/indonesia-extremism-and-terrorism>.
- Direktorat Amerika I. 2019. -Laporan Kinerja 2019 Direktorat Amerika 1 Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. *Laporan Kinerja. Kementerian Luar Negeri Indonesia*. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0RpcmVrdG9yYXQIMjBKZW5kZXJhbCUyMEFNRVJPUCC9MS0oIMjAyMDE5L0xLSiUyMEFtZXJpa2ElMjBJJTlwVEFIVU4lMjAyMDE5LnBkZg==>.

- Ernst & Young Indonesia. 2019. –Making an Impact: US-Indonesia Investment Report. Investment report.
https://www.uschamber.com/assets/documents/indonesiareport_makingimpact.pdf
- Fitriani, dan Vino Chandra Panduwinata. 2018. –Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015-2018). CSIS, no. CSIS WORKING PAPER SERIES: 1–39.
- G. Jones, Seth, Catrina Doxsee, dan Nicholas Harington. 2020. —The Escalating Terrorism Problem in the United States. 2020.
<https://www.csis.org/analysis/escalating-terrorism-problem-united-states>.
- Ganor, Boaz. 2014. –Identifying the Enemy in Counterterrorism Operations - A Comparison of the Bush and Obama Administrations 90: 21.
- Global Fire Power. 2021. –GlobalFirepower.Com Ranks. 1 Maret 2021.
<https://www.globalfirepower.com/global-ranks-previous.php>.
- Hang, Nguyen Thi Thuy. 2018. –The U.S.-Asean Relations: An Overview. *Slovak Journal of Political Sciences* 18 (1): 69–83.
- Haqqi, Halifa. 2012. –PERBANDINGAN GAYA DIPLOMASI ANTARA PEMERINTAHAN GEORGE W. BUSH DAN BARRACK OBAMA DALAM MENGHADAPI ISUE TERRORISME, no. 25: 5.
- Hara, Abubakar Eby, dan Nur Azizah. 2022. –Securitization of Terrorism and Human Rights Protection in Indonesia. *KnE Social Sciences*, Juni, 83–95.
<https://doi.org/10.18502/kss.v7i11.11328>.
- Haris, Mohammad Akmal. 2020. —PANDANGAN DAN KONSEP DERADIKALISASI BERAGAMA PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA 6 (2): 14.
- Hasanah, Nur. 2018. –UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI TERORISME PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2014 - 2019 6: 881–92.
- Hellmuth, Dorle. 2021. – ‘The Same Procedure as Every Year’: U.S. Counterterrorism Policy since 9/11. *Center for the Study of Statesmanship The Catholic University of America* XXXIV: 26.
- Hidayat, Muhammad Nizar. 2018. –ANALISIS KEBIJAKAN PEMULIHAN CITRA INDONESIA PADA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN SBY. *Jurnal Administrative Reform* 5 (4): 227. <https://doi.org/10.52239/jar.v5i4.958>.
- Ibad, M Syaiful, dan Thomas Aji. 2020. –BOM BALI 2002. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1–14.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian BUMN. 2021. –Undang-Undang UU Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 | JDIIH Kementerian BUMN. 19 Juni 2021.
<https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%205%20Tahun%202018>.
- Jelita, Insi Nantika. 2018. –LSI: Mayoritas Publik Khawatir dengan Aksi Terorisme di Indonesia. 31 Juli 2018. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/175391/lsi-mayoritas-publik-khawatir-dengan-aksi-terorisme-di-indonesia>.
- Kandi, Rosmiyanti Dewi, dan Oktaviani Satyaningtyas. 2016. –Menteri Luhut Ingin Percepat Revisi UU Antiterorisme. nasional. 16 Juli 2016.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160716141136-12-145123/menteri-luhut-ingin-percepat-revisi-uu-antiterorisme>.

- Kartika, Shanti Dwi. 2018. -POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TERORISME. *Jurnal Hukum* 10 (10): 6.
- Kedang, Ambrosius Yustinus. 2017. -Internasionalisasi dan Internalisasi Wacana War on Terror. *JURNAL SOSIAL POLITIK* 3 (2): 21. <https://doi.org/10.22219/sospol.v3i2.4883>.
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. 2015. -Pernyataan Bersama Presiden Amerika Serikat dan Presiden Republik Indonesia. *Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia*. 26 Oktober 2015. <https://id.usembassy.gov/id/pernyataan-bersama-presiden-amerika-serikat-dan-presiden-republik-indonesia/>.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, ed. 2015. *BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA 2015*. Cet. 3. Jakarta: Departemen Pertahanan, Republik Indonesia.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2017. -Bertemu Presiden Trump, Presiden Jokowi Bahas Kerja Sama Ekonomi Dan Penanggulangan Terorisme | Sekretariat Negara. 8 Juli 2017. https://www.setneg.go.id/baca/index/bertemu_presiden_trump_presiden_jokowi_bahas_kerja_sama_ekonomi_dan_penanggulangan_terorisme.
- Kompas. 2014. -Tokoh Agama dan Kepercayaan Tolak ISIS. *KOMPAS.com*. 4 Agustus 2014. <https://nasional.kompas.com/read/xml/2014/08/04/18093641/Tokoh.Agama.dan.Kepercayaan.Tolak.ISIS>.
- Kurlantzick, Joshua. 2018. -Keeping the U.S.-Indonesia Relationship Moving Forward. *Council on Foreign Relations: Center for Preventive Action*, 1–27.
- Kusuma, Ardli Johan, Tulus Warsito, Surwandono Surwandono, dan Ali Muhammad. 2019. -Indonesia dan Ancaman Terorisme: Dalam Analisis Dimensi Imaterial. *Sosiohumaniora* 21 (3). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.21142>.
- Kusuma, Ardli Johan, Tulus Warsito, Surwandono Surwandono, Ali Muhammad, Mega Hidayati, dan Muhlis Madani. 2019. —The Construction of the Indonesian Government's Repressive Counter-Terrorism Policy. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9 (2): 107–25. <https://doi.org/10.26618/ojip.v9i2.1845>.
- L. Connelly, Aaron. 2015. -Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges. *Contemporary Southeast Asia* 37 (1): 1–28. <https://doi.org/10.1355/cs37-1a>.
- Lindawaty, Debora Sanur. 2016. -UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME ISIS DI INDONESIA DALAM MELINDUNGI KEAMANAN NASIONAL. *Politica* 7 (1): 25–47.
- Lumbangaol, Dorpaima. 2021. -The Journey of Indonesia Foreign Policy and Recommendations in Responding Global Terrorism and Radicalism. *Journal of Government and Political Issues* 1 (2): 108–17. <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i2.18>.
- Marshall, Brent K., J. Steven Picou, dan Duane A. Gill. 2003. -TERRORISM AS DISASTER: SELECTED COMMONALITIES AND LONG-TERM RECOVERY FOR 9/11 SURVIVORS. *Dalam Research in Social Problems and Public Policy*, 11:73–96. Bingley: Emerald (MCB UP). [https://doi.org/10.1016/S0196-1152\(03\)11006-X](https://doi.org/10.1016/S0196-1152(03)11006-X).
- Matondang, Erlinda. 2016. -PENANGANAN ISU TERORISME DALAM KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA PADA TAHUN 2002—2015. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 6 (1): 99–117. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i1.296>.

- Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia. 2018. -INDONESIA - US BILATERAL RELATIONS. Embassy of The Republic of Indonesia in Washington D.C. The United States of America. 2018. <https://kemlu.go.id/washington/en>.
- Mukhlis, Maulana, Imam Mustofa, dan Ahmad Syarifudin. 2022. —The Role of Civil Society Organizations in Combating Religious Based Radicalism in Indonesia: A Critical Analysis from the Perspective of Collaboration Governance. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences* 7 (4): 155–63. <https://doi.org/10.36348/sjhss.2022.v07i04.007>.
- Mukhtar, Sidratahta. 2021. -Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Menanggulangi Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, 51–59.
- Mumtaznur. 2016. -Analisa Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Memberantas Terorisme Pada Masa Pemerintahan Presiden George W. Bush. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 1 (2): 12–25.
- Murphy, Ann Marie. 2019. -Prospects for U.S.-Indonesian Relations in Jokowi's Second Term. *Asia Policy* 26 (4): 79–87. <https://doi.org/10.1353/asp.2019.0048>.
- Murtaufiq, Sudarto. 2019. -The NU Concept of Islam Nusantara in Dealing With Radicalism and Terrorism. *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6 (1): 63–74.
- Panuju, Redi. 2019. —PERJALANAN WACANA JOKOWI DALAM PENCALONANNYA SEBAGAI KANDIDAT PRESIDEN 2019-2024. *Komuniti : Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi* 10 (2): 149–64. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v10i2.6753>.
- Pratama, Oki. 2020. —Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia. *Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut*. 1 Juli 2020. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>.
- Pratiwi, Diah Ayu. 2016. -KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TERORISME INTERNASIONAL. *JURNAL DIMENSI* 4 (1): 1–11. <https://doi.org/10.33373/dms.v4i1.28>.
- Pusat Penelitian Politik LIPI. 2018. -Pusat Penelitian Politik LIPI Sosialisasikan Hasil Survei Untuk Penguatan Demokrasi. *Agustus 2018*. <http://lipi.go.id/berita/single/Pusat-Penelitian-Politik-LIPI-Sosialisasikan-Hasil-Survei-untuk-Penguatan-Demokrasi/21018>.
- Qodir, Zuly. 2012. -PERAN NEGARA DAN AGAMA DALAM MEMERANGI TERORISME, 16.
- Ramakrishna, Kumar. 2005. - 'The Southeast Asian Approach' to Counter-Terrorism: - Learning from Indonesia and Malaysia. 2005. <https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCS/article/download/189/333?inline=1>.
- Rasyid, Moh. 2015. -Muktamar 2015 dan Politik NU dalam Sejarah Kenegaraan. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: Yudisia* 6 (1): 201–36.
- Rilistya, Cesarani. 2016. -IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DENGAN AS DALAM PENANGANAN AKSI TERORISME DI INDONESIA. *Journal of International Relations* 2 (1): 166–73.
- Schanzer, David, dan Joe Eyeran. 2019. -Engaging With Communities To Prevent Violent Extremism: A Review of the Obama Administration's CVE Initiative. *National Institute of Justice*, 1–76.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2022. -Kabinet Kerja. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. 2022. <https://setkab.go.id/kabinet-kerja/>.

- Seniwati, dan Andi Alimuddin. 2016. —THE UNITED STATES – INDONESIAN MILITARY RELATIONSHIP IN COUNTERING TERRORISM IN INDONESIA. *Jurnal Wawasan Yuridika* 2 (8): 6.
- Shiddiqy, Muhammad Arsy Ash, dan Arfin Sudirman. 2019. –Comparison of Indonesian Military Strength with Southeast Asian Countries and Probability for an Open War. *Central European Journal of International and Security Studies* 13 (4): 318–40.
- Sjöholm, Fredrik. 2017. —Foreign Direct Investment and Value Added in Indonesia. *Dalam The Indonesian Economy*, oleh Lili Yan Ing, Gordon H. Hanson, dan Mulyani Indrawati, 1 ed., 238–60. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315161976-10>.
- Starr-Dellen, Donna, dan Patricia Pazos. 2018. –Countering Violent Extremism and Deradicalization: Comparative Study of Spain, Belgium, and the USA. *SSRN*, 1–24.
- Sujasmin. 2017. –PENETAPAN ASPEK HUKUM PIDANA MATERIEL DALAM RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. *Jurnal Wawasan Yuridika* 1 (1): 64. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.128>.
- Sukadis, Beni. 2018. —PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 1 (1): 92–123. <https://doi.org/10.33822/mjihi.v1i1.285>.
- Sukma, Rizal. 2003. *Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic Weakness and Dilemma of Dual Identity*. New York; London: Routledge Curzon.
- Sumpter, Cameron, dan Joseph Franco. 2018. –Migration, Transnational Crime and Terrorism: Exploring the Nexus in Europe and Southeast Asia. *Journal of International and Security Studies* 12 (5): 15.
- Susanti, Reni. 2015. —Survei: Terorisme Internasional, Kejahatan Paling Disorot Media Online Sepanjang 2015. *KOMPAS.com*. 27 Desember 2015. <https://nasional.kompas.com/read/xml/2015/12/27/09102341/Survei.Terrorisme.Internasional.Kejahatan.Paling.Disorot.Media.Online.Sepanjang.2015>.
- Syailendra, Emirza Adi. 2016. –Jokowi and the Luhut factor | East Asia Forum. *Agustus 2016*. <https://www.eastasiaforum.org/2016/08/27/jokowi-and-the-luhut-factor/>.
- The Habibie Center. 2018. –Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan Aspek-aspek Penting Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme. *The Habibie Center*.
- The Jakarta Post. 2018. –Indonesians More Worried about Terrorism, Support Stronger Measures: Survey. *The Jakarta Post*. 31 Juli 2018. <https://www.thejakartapost.com/news/2018/07/31/indonesians-more-worried-about-terrorism-support-stronger-measures-survey.html>.
- Triono, Aru Lego. 2021. –Survei: Jumlah Besar Nahdliyin Punya Bobot Politik Strategis. *nu.or.id*. Desember 2021. <https://www.nu.or.id/nasional/survei-jumlah-besar-nahdliyin-punya-bobot-politik-strategis-WyiQQ>.
- Triskaputri, Rifana Meika. 2019. –Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia. *Journal of Terrorism Studies* 1 (1): 61–74. <https://doi.org/10.7454/jts.v1i1.1005>.
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2021. *Complex Terrorist Cases for South and South-East Asia: Investigation, prosecution, adjudication, rehabilitation and reintegration*. Wina: United Nations.

- https://www.unodc.org/res/terrorism/resources/capacity-building_html/21-06370_eBook.pdf.
- U.S. Department of State. 2022. –U.S. Relations With Indonesia.‖ *United States Department of State* (blog). 19 April 2022. <https://www.state.gov/u-s-relations-with-indonesia/>.
- U.S Embassy and Consulates in Indonesia. 2019. –The United States and ASEAN: Expanding the Enduring Partnership.‖ U.S. Embassy & Consulates in Indonesia. 6 November 2019. <https://id.usembassy.gov/the-united-states-and-asean-expanding-the-enduring-partnership/>.
- Utama, Abraham. 2015. –Dubes Amerika Serikat Temui Luhut.‖ nasional. 19 November 2015. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151119175324-20-92792/dubes-amerika-serikat-temui-luhut>.
- Vedaschi, Arianna, dan Gabriele Marino Noberasco. 2021. –Counter-Terrorism under the Trump Presidency.‖ *DPCE Online* 46 (1). <http://193.205.23.57/index.php/dpceonline/article/view/1295>.
- VOA Indonesia. 2018. –MOU Perkuat Kerjasama Kontraterorisme Indonesia-AS Ditandatangani.‖ VOA Indonesia. 14 September 2018. <https://www.voaindonesia.com/a/mou-perkuat-kerjasama-kontraterorisme-indonesia-as-ditandatangani/4571844.html>.
- Waluyo, Andylala. 2016. –BIN Minta Kewenangan Tangkap dan Tahan Orang yang Dicurigai Teroris.‖ VOA Indonesia. 16 Januari 2016. <https://www.voaindonesia.com/a/bin-minta-kewenangan-tangkap-dan-tahan-orang-yang-dicurigai-teroris/3147810.html>.
- Wardah, Fathiyah. 2016. –Survei: 95% Masyarakat Indonesia Tolak ISIS.‖ VOA Indonesia. 2016. <https://www.voaindonesia.com/a/survei-95-persen-masyarakat-indonesia-tolak-isis-/3159461.html>.
- Widajatun, Vincentia Wahyu, dan Sakina Ichsani. 2019. –DAMPAK KEJADIAN AKSI TERORIS 2000 – 2016 DI INDONESIA‖ 2: 61–70.
- Widiatmaja, Aji, dan Ulul Albab. 2019. –Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional.‖ *Politica*.
- Windiani, Reni. 2018. —Peran Indonesia Dalam Memerangi Teroris.‖ *JURNAL ILMU SOSIAL* 16 (2): 135–52.
- World Bank Data. 2022. –Military expenditure (current USD) - Indonesia | Data.‖ 2022. <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?end=2019&locations=ID&start=2014&view=chart>.
- Wuryandari, Ganewati. 2014. –POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ISU TERORISME INTERNASIONAL.‖ *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 71–83.
- Yunanto, Sri, Angel Damayanti, dan Indah Novitasari. 2017. –ANCAMAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN TERORISME DI DUNIA DAN INDONESIA.‖ 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/231093074.pdf>.
- Zuhri, Sholehudin, Nandang A. Delianoor, dan Mudiwati Rahmatunnisa. 2018. –KEKUASAAN PARTAI SIMPLE MAJORITY DALAM FORMULASI KEBIJAKAN.‖ *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 3 (2): 101–16.